

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA DIVISI K3
PT. PUTRA STEELINDO PERKASA CILEGON**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Program D-IV (Sarjana Terapan) Manajemen dan Administrasi Logistik,
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro**



Disusun Oleh:

Nama : Raka Ramdani
NIM : 40011321650011

**PROGRAM STUDI D-IV (SARJANA TERAPAN)
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Persembahan

Pada lembar yang paling inti dalam Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada Bapak Syarifudin dan Ibu Fridayanti selaku orang tua saya yang selalu memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik dan membesarkan dalam limpahan kasih sayang. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya. Terima kasih sudah selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis dalam keadaan suka maupun duka, berkorban keringat, tenaga dan pikiran sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik – baiknya.

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Raka Ramdani
Nomor Induk Mahasiswa : 40011321650011
Fakultas / Jurusan : Sekolah Vokasi / Manajemen dan Administrasi Logistik
Judul Skripsi : "Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon"
Dosen Pembimbing : Dr. Edy Raharja, S.E., M.Si

Semarang,
Dosen
Pembimbing



Dr. Edy Raharja, S.E., M.Si
NIP. 197112302001121001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada
Divisi K3 PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon
Nama : Raka Ramdani
NIM : 40011321650011
Program Studi : Manajemen dan Administrasi Logistik

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan
D-IV (Sarjana Terapan) Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro.

Dosen Pembimbing
Dr. Edy Raharja, S.E., M.Si
NIP. 197004251997021001

()

Dosen Penguji 1
Anafil Windriya, S.E., M.M
NIP. 199301242019032017

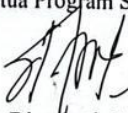
()

Dosen Penguji 2
Agung Budiatmo, S.Sos., M.M
NIP. 197112302001121001

()

Semarang,

Ketua Program Studi


Dr. Titik Djumarti, S.Sos., M.Si
NIP. 197009251994032001

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Raka Ramdani
2. Nomor Induk Mahasiswa : 40011321650011
3. Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Agustus 2003
4. Program Studi : Manajemen dan Administrasi Logistik
5. Alamat : Pesona Kalisari RT 07 RW 05

Saya dengan tulus menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Divisi K3 PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon” adalah hasil karya ilmiah tulisan saya sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain. Apabila terbukti di masa depan bahwa karya ilmiah ini bukan hasil karya saya sendiri, tetapi merupakan penjiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi, termasuk pembatalan karya ilmiah beserta konsekuensi yang menyertainya, sebagai akibat dari pelanggaran yang saya lakukan. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab..

Semarang,



Raka Ramdani

NIM.40011321650011

ABSTRAK

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan, khususnya pada sektor industri manufaktur yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerapan prinsip GCG pada Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, terutama pada prinsip *responsibility* yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam menjamin keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penerapan prinsip *responsibility* GCG pada Divisi K3, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta dampaknya terhadap kinerja keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya prinsip *responsibility*, mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penerapannya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *responsibility* dalam Divisi K3 belum berjalan secara optimal. Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan K3, penyediaan fasilitas keselamatan kerja, serta penegakan disiplin terhadap kebijakan K3. Meskipun demikian, perusahaan telah menunjukkan komitmen awal dalam menerapkan prinsip GCG melalui penyusunan kebijakan K3 dan upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan komitmen manajemen, penguatan kebijakan K3, pelatihan berkelanjutan bagi karyawan, serta evaluasi rutin agar penerapan prinsip GCG dapat berjalan lebih efektif dan mendukung keberlanjutan perusahaan.

Kata Kunci : Alat Pelindung Diri (APD), *Good Corporate Governance*, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), *Responsibility*,

ABSTRACT

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is an important aspect in improving company performance and sustainability, especially in the manufacturing industry sector which has a high level of work risk. This research is motivated by the suboptimal implementation of GCG principles in the Occupational Health and Safety (K3) Division of PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, especially the responsibility principle related to the company's responsibility in ensuring occupational safety and compliance with applicable regulations. The problem formulation in this research includes how the GCG responsibility principle is implemented in the K3 Division, the challenges faced in its implementation, and its impact on the company's occupational safety and health performance. This research aims to analyze the level of implementation of Good Corporate Governance principles, especially the responsibility principle, identify challenges that arise in its implementation, and evaluate its impact on K3 performance at PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. The research method used is a qualitative method with a case study approach, through data collection techniques in the form of interviews, observations, and analysis of company documents. The results of the study indicate that the implementation of the responsibility principle in the K3 Division has not been running optimally. There are still weaknesses in the supervision of K3 implementation, the provision of work safety facilities, and the enforcement of discipline towards K3 policies. Nevertheless, the company has demonstrated an initial commitment to implementing GCG principles through the development of an OHS policy and efforts to create a safer work environment. Therefore, this study recommends increased management commitment, strengthened OHS policies, ongoing employee training, and regular evaluations to ensure more effective implementation of GCG principles and support the company's sustainability.

Keywords: Personal Protective Equipment (PPE), Good Corporate Governance, Occupational Health and Safety (K3), Responsibility

KATA PENGANTAR

Terima kasih atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik dan lancar. Saya menjalankan misi akhir ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik.

Banyak pihak yang terkait dalam penyusunan Tugas Akhir ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada pihak – pihak terkait atas segala peran sertanya yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir tersebut, kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr, Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Titik Djumiarti, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi D4 Manajemen dan Administrasi Logistik Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
4. Ibu Anafil Windriya, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Studi D4 Manajemen dan Administrasi Logistik Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Edy Raharja, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen D4 Manajemen dan Administrasi Logistik yang sudah memberikan ilmu selama perkuliahan.

7. Seluruh staff dan karyawan di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
8. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan banyak support dari awal hingga pada titik penyelesaian tugas akhir.
9. Semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian Tugas Akhir.

Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya kepada seluruh pihak apabila dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna bagi semua pihak sebagai pengetahuan dan bahan pembelajaran bagi kehidupan sehari – hari.

Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini, dan sebagai bahan pendewasaan serta motivasi bagi penulis.

Semarang,
Penulis




Raka Ramdani
NIM.40011321650011

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Teori	7
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu (KPT)	13
2.3 Alur Kerangka Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Fokus dan Lokus Penelitian.....	40
3.3 Fenomena Penelitian	41
3.4 Sumber Data Penelitian	42
3.5 Penentuan Informan Penelitian	43
3.6 Instrumen Penelitian.....	46
3.7 Teknik Pengumpulan Data	47
3.8 Teknik Analisis Data	48
3.9 Triangulasi Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	60
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	67
4.3 Output Penelitian.....	77
BAB V PENUTUP	84

5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keaslian Penelitian	23
Tabel 3. 1 Informan dalam Penelitian.....	46
Tabel 3. 2 Tabel Keabsahan Pertanyaan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	38
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data Kualitatif.....	50
Gambar 4. 1 Logo PT Putra Steelindo Perkasa	63
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	65
Gambar 4. 3 Gambar Hot Work Permit	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	91
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	99
Lampiran 3 Biodata Peneliti	100
Lampiran 4 Surat Bebas Plagiarisme	101
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang di tandai dengan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dihadapkan dengan tantangan untuk mencapai visi dan misi mereka. Untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan, perusahaan dituntut untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG). GCG merupakan kerangka kerja yang memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. GCG tidak hanya meningkatkan efesiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholder), seperti pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat luas. Penerapan GCG yang efektif juga dapat meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Prinsip-Prinsip GCG meliputi Transparan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran (*Fairness*). Pertama, transparansi menurut perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat dan tepat waktu kepada stakeholder. Kedua, akuntabilitas mengharuskan perusahaan memiliki struktur tanggung jawab yang jelas dalam pengambilan keputusan. Ketiga, tanggung jawab mengacu pada komitmen perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan serta bertanggung jawab atas dampak operasionalnya terhadap lingkungan, masyarakat dan karyawan. Keempat, independensi memastikan bahwa keputusan perusahaan bebas dan konflik kepentingan. Kelima, kewajiban menekankan perlakuan yang adil terhadap semua stakeholder tanpa diskriminasi.

Penerapan kelima prinsip ini secara konsisten dapat menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Fokus khusus dalam penelitian ini yaitu prinsip responsibility, yang menjadi pilar penting dalam GCG. Prinsip ini menekan bahwa perusahaan harus menjalankan operasionalnya dengan mematuhi regulasi yang berlaku, seperti undang-undang ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Selain itu, responsibility mencakup tanggung jawab sosial perusahaan, yang mencakup upaya untuk meminimalkan dampak negatif operasional terhadap lingkungan dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Penerapan GCG memiliki peran sangat krusial dalam sektor industri, terutama pada perusahaan manufaktur yang beroperasi di lingkungan dengan risiko tinggi, seperti industri baja. Salah satu divisi yang memainkan peran strategis dalam mendukung penerapan GCG adalah Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Divisi K3 bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan perusahaan mematuhi standar keselamatan kerja yang diatur dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan K3, melaksanakan pelatihan keselamatan, melakukan inspeksi rutin dan memastikan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Meskipun penting, penerapan GCG pada divisi K3 sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kelemahan yang umum terjadi meliputi kurangnya cakupan kebijakan K3 yang komprehensif, rendahnya pemahaman karyawan dan manajemen tentang pentingnya prinsip GCG, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan K3. Kelemahan ini dapat menyebabkan risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi, kerusakan lingkungan, dan penurunan kepercayaan stakeholder. Kurangnya komitmen manajemen terhadap penerapan GCG, khususnya prinsip responsibility, sering kali menjadi faktor utama dalam kegagalan pengelolaan K3 di perusahaan industri.

PT Putra Steelindo Perkasa, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi baja hollow dan berlokasi di Cilegon, Banten, tidak luput dari tantangan tersebut. Sebagai sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor industri beresiko tinggi, PT Putra Steelindo Perkasa menghadapi kebutuhan mendesak untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif, terutama pada Divisi K3. Pengamatan di awal menunjukkan bahwa perusahaan ini masih menghadapi kendala dalam hal kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja, pengawasan kebijakan K3, dan integrasi prinsip GCG dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip GCG, khususnya responsibility, diterapkan pada Divisi K3, serta untuk

mengidentifikasi tantangan, risiko, dan dampaknya terhadap kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

Penelitian ini terinspirasi dari pengalaman magang peneliti selama lima bulan di PT Putra Steelindo Perkasa, Cilegon. Selama periode magang, peneliti mengamati berbagai aspek pelaksanaan K3, termasuk kebijakan keselamatan kerja, pelatihan pada karyawan, dan pengawasan dalam operasional. Pengamatan ini mengungkapkan adanya potensi perbaikan dalam penerapan prinsip GCG, terutama dalam hal bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dijalankan. Berdasarkan pengalaman tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip GCG diterapkan pada Divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa, serta bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja. Oleh karena itu, peneliti mengajukan Tugas Akhir berjudul **“Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon”**. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan melalui rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas tata kelola dan keselamatan kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menyesuaikan dan relevansi terkait pembahasan dalam karya tulis ini, Penulis memfokuskan pada permasalahan mengenai fenomena yang sudah diambil yaitu mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mendukung efektivitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di sektor industri manufaktur, khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang baja dan konstruksi seperti PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Dengan adanya fenomena

permasalahan tersebut yang diambil oleh Penulis dan mengingat bahwa aktivitas pada K3 memiliki lingkup resiko yang luas. Dengan demikian, pembahasan akan tetap terfokus dan tidak meluas.

1. Bagaimana prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya prinsip responsibility, diterapkan pada Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Putra Steelindo Perkasa, Cilegon?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip responsibility GCG pada Divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa?
3. Bagaimana dampak penerapan prinsip responsibility GCG terhadap kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di PT Putra Steelindo Perkasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Menganalisis tingkat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya prinsip responsibility, pada Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Putra Steelindo Perkasa, Cilegon.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip responsibility GCG pada Divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa.
3. Mengevaluasi dampak penerapan prinsip responsibility GCG terhadap kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di PT Putra Steelindo Perkasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Tugas Akhir ini untuk memperluas pengetahuan dan menerapkan teori yang telah dipelajari, serta mengembangkan kemampuan berfikir kritis dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada Divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon.

2. Bagi Program Studi D4 Manajemen dan Administrasi Logistik

Tugas Akhir ini digunakan sebagai referensi serta menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang hendak melaksanakan penelitian serupa di masa depan.

3. Bagi Perusahaan

Tugas Akhir ini digunakan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi terkait penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Divisi K3, guna meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon dalam pencapaian target termasuk Visi & Misi Perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah sistem tata kelola Perusahaan yang mengatur dan mengendalikan Perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. GCG hadir sebagai respons terhadap berbagai macam kegagalan korporasi akibat tata kelola yang buruk dan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun fondasi bisnis berkelanjutan. Menurut Sutedi (2021)(3), tata kelola perusahaan yang baik memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka Panjang bagi pemegang saham, sekaligus memperhatikan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam penerapannya, GCG dilandasi oleh konsep transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang memiliki tujuan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan dalam waktu jangka panjang.

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi semakin penting dalam konteks bisnis modern, terutama dengan semakin kompleksnya operasi dalam perusahaan dan meningkatnya tuntutan dari pemangku kepentingan. Hamdani (2016) menjelaskan bahwa implementasi GCG yang konsisten akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik, menghindari konflik kepentingan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Dalam konteks industri yang memiliki risiko tinggi seperti manufaktur dan konstruksi, penerapan prinsip-prinsip GCG dapat menjadi sangat krusial, tidak

hanya untuk aspek finansial namun juga untuk aspek keselamatan operasional. Menurut penelitian Hidayat (2019), perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki catatan keselamatan kerja yang lebih baik dan lebih taat pada peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Pratiwi (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara implementasi GCG dengan kinerja manajemen risiko perusahaan, termasuk dalam pengelolaan risiko keselamatan dan kesehatan kerja.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG terdiri dari lima aspek fundamental yang menjadi suatu landasan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pertama, transparansi (transparency) mengacu pada keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi menjadi factor utama dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan mitigasi praktik korupsi dalam organisasi. Transparansi meliputi publikasi informasi keuangan, kebijakan perusahaan, struktur organisasi, dan keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh manajemen.

Kedua, akuntabilitas (accountability) berkaitan dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Akuntabilitas mewajibkan perusahaan untuk memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif, termasuk dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memahami peran, tanggung jawab, dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Ketiga, *responsibilitas* (*responsibility*) mencerminkan kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku. *Responsibilitas* meliputi kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, standar industri, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks K3, *responsibilitas* terwujud dalam kepatuhan perusahaan terhadap peraturan keselamatan kerja dan perlindungan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keempat, *independensi* (*independency*) menuntut perusahaan untuk dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. *Independensi* dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan kebijakan yang lebih objektif dan berorientasi pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan. *Independensi* menjamin bahwa setiap keputusan terkait K3 diambil berdasarkan pertimbangan profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sepihak.

Kelima, *kewajaran dan kesetaraan* (*fairness*) menjamin sebuah perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi semua hak pemangku kepentingan. Prinsip *kewajaran* mencakup keadilan dalam perlakuan terhadap seluruh karyawan, termasuk dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan prinsip *kewajaran* memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan perlindungan K3 yang memadai tanpa diskriminasi.

2.1.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dan operasional perusahaan, terutama di sektor

industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi. K3 adalah upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks industri modern, K3 tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk keberlanjutan bisnis.

Dalam implementasi K3 yang ingin efektif diperlukan komitmen dari seluruh jajaran perusahaan, mulai dari tingkat manajemen tertinggi hingga seluruh pekerja. Nadia Safira et.al (2025) menyatakan bahwa budaya K3 yang kuat dalam perusahaan berkorelasi positif dengan penurunan angka kecelakaan kerja dan peningkatan produktivitas karyawan. Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3 secara komprehensif cenderung memiliki kinerja bisnis yang lebih baik dikarenakan mampu mengurangi biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja dan gangguan operasional (Wibowo, 2019).

Regulasi K3 di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundangan-undangan, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kepatuhan terhadap regulasi K3 tidak hanya mengurangi risiko hukum bagi perusahaan, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen dan investor. Lebih dari sekadar kepatuhan, sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan (Praditya et.al, 2025).

2.1.4 Integrasi Good Corporate Governance dengan Manajemen K3

Integrasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance ke dalam system manajemen K3 menjadi suatu pendekatan komprehensif untuk meningkatkan efektivitas program K3 dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Lintang et.al (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip transparansi dalam konteks K3, seperti keterbukaan informasi mengenai statistik kecelakaan kerja dan upaya mitigasinya, cenderung mempunyai tingkat kepatuhan K3 yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam manajemen K3 yang tercermin dalam kejelasan struktur organisasi dan tanggung jawab K3 sangat berpengaruh positif terhadap kinerja K3 perusahaan.

Penerapan prinsip responsibilitas dalam konteks K3 terlihat dari kepatuhan perusahaan terhadap peraturan K3 yang berlaku dan komitmen untuk melampaui standar minimum yang ditentukan oleh regulasi. Menurut Ratnasari dan Prastiwi (2019), perusahaan yang menerapkan prinsip responsibilitas dalam K3 cenderung lebih proaktif dalam melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko di tempat kerja. Prinsip independensi dalam konteks K3 memastikan bahwa keputusan-keputusan terkait keselamatan kerja diambil secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan biaya atau tekanan produksi semata. Independensi dalam pengambilan keputusan K3 meminimalkan risiko kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kompromi terhadap standar keselamatan (Kadri et.al, 2023).

Prinsip kewajaran dalam K3 tercermin dalam perlakuan yang adil terhadap seluruh pekerja tanpa memandang jabatan maupun status kepegawaian dalam hal penyediaan perlindungan K3. Penerapan prinsip kewajaran dalam K3 seperti

penyediaan alat pelindung diri (APD) dan pelatihan K3 bagi seluruh pekerja dapat (Setiarsih et.al, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, Indrayani dan Susilowati (2020) menemukan bahwa implementasi GCG dalam manajemen K3 meningkatkan efektivitas komunikasi dan partisipasi pekerja dalam program K3.

2.1.5 Penerapan Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam industri manufaktur, khususnya pada sektor pengolahan logam seperti PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, memiliki karakteristik yang khas terkait dengan kompleksitas operasional dan tingginya risiko keselamatan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih et.al (2020) menunjukkan bahwa implementasi GCG dalam industri manufaktur berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, terutama dalam aspek efisiensi operasional dan pengelolaan risiko. Lebih lanjut, Buyang et.al. (2024) menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Divisi K3 perusahaan manufaktur berkontribusi pada penurunan tingkat kecelakaan kerja dan peningkatan kesadaran karyawan terhadap budaya keselamatan.

Dalam konteks industri baja, implementasi GCG yang efektif pada Divisi K3 memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan (Malgorzata et.al. 2022). Perusahaan yang menerapkan prinsip responsibilitas dalam konteks K3 tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga mengembangkan standar keselamatan yang lebih tinggi sesuai dengan praktik terbaik internasional. Menurut Umam et.al (2020), independensi dalam manajemen K3 pada industri baja memungkinkan profesional K3 untuk membuat

keputusan berbasis risiko tanpa dipengaruhi oleh tekanan produksi atau pertimbangan biaya jangka pendek.

Prinsip kewajaran dalam konteks K3 pada industri manufaktur memastikan bahwa semua pekerja, baik pekerja tetap maupun kontrak, mendapatkan perlindungan K3 yang memadai. Penelitian Satria dan Dwiatmadja (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip kewajaran dalam manajemen K3 memiliki tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi dan tingkat turnover yang lebih rendah. Aspek ini menjadi semakin relevan dalam industri baja yang sering menghadapi tantangan dalam hal retensi tenaga kerja terampil dan berpengalaman.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu (KPT)

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan dukungan dari penelitian sebelumnya. Kajian penelitian terdahulu dipakai oleh penulis sebagai landasan dalam menyelaraskan teori dengan hasil penelitian yang mencakup analisis prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) diterapkan dalam pengelolaan K3 di industri manufaktur baja. Berikut beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Semen Indonesia. Nugraha dan Wibowo (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Wibowo (2020) berjudul "Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Semen Indonesia"

bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan K3 di PT Semen Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan K3 di PT Semen Indonesia telah berjalan dengan baik, tercermin dari penurunan angka kecelakaan kerja dan peningkatan produktivitas karyawan. Persamaan dengan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa adalah keduanya menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dalam konteks K3. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan industri yang berbeda, di mana PT Semen Indonesia bergerak di industri semen, sedangkan PT Putra Steelindo Perkasa bergerak di industri baja.

2. *Implementasi, Environment, Occupational Health and Safety, Stakeholder's Engagement dan Corporate Governance dalam Kaidah Pertambangan – Sukmawan Nurhamda (2025)*

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawan Nurhamda (2025) berjudul “*Implementasi Environment, Occupational Health and Safety, Stakeholder's Engagement dan Corporate Governance dalam Kaidah Pertambangan*” bertujuan untuk menganalisis penerapan GCG yang terintegrasi dengan OHS pada industri pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik mendukung peningkatan keselamatan

kerja dan kepatuhan regulasi. Persamaan dengan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa adalah keduanya sama-sama membahas GCG dan keselamatan kerja (K3). Perbedaannya terletak pada objek penelitian sektor pertambangan, sedangkan penelitian ini pada industri baja.

3. Implementasi Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pratama dan Sukardi, (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Sukardi, (2020) berjudul “Implementasi Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk” bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko pada PT Krakatau Steel. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Krakatau Steel telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko yang terintegrasi dalam kegiatan operasionalnya, termasuk pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Persamaan dengan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa adalah keduanya menganalisis implementasi GCG pada perusahaan yang bergerak di industri baja dan memiliki fokus pada aspek K3. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian, di mana penelitian Pratama dan Sukardi mencakup manajemen risiko secara lebih luas, sedangkan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa lebih spesifik pada penerapan GCG di divisi K3.

4. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Petrokimia Gresik. Wulandari dan Suharno (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Suharno (2020) dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Petrokimia Gresik” bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan risiko K3 di PT Petrokimia Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan risiko K3 di PT Petrokimia Gresik telah berjalan dengan baik, tercermin dari penurunan angka kecelakaan kerja dan peningkatan kualitas lingkungan kerja. Persamaan dengan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa adalah keduanya menganalisis implementasi prinsip-prinsip GCG dalam konteks K3. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Wulandari dan Suharno berfokus pada pengelolaan risiko K3, sedangkan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa berfokus pada divisi K3 secara keseluruhan.

5. Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. XYZ Andrew F.C. Silalahi (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Andrew F.C. Silalahi dengan judul “Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. XYZ” bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap kinerja K3 pada perusahaan industri. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja K3 dan kepatuhan pekerja. Persamaan dengan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa adalah keduanya sama-sama mengkaji prinsip GCG dalam konteks K3. Perbedaannya penelitian ini yaitu penelitian ini kuantitatif, sedangkan penelitian penulis bersifat kualitatif.

6. Board Size, Board Independence and Occupational Health and Safety Risk Management Performance, Luke Charles Chikosi dan Ashley Teedzwi Mutezo (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Luke Charles Chikosi dan Ashley Teedzwi Mutezo (2025) dengan judul “Board Size, Board Independence and Occupational Health and Safety Risk Management Performance” bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen risiko OHS. Metode penelitian yang dilakukan Adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme GCG berpengaruh terhadap kinerja OHS. Sama-sama meneliti dan membahas GCG dan keselamatan kerja. Perbedaanya Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian perusahaan internasional

sedangkan penelitian ini dilakukan secara kualitatif pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon dengan fokus pada implementasi prinsip GCG untuk meningkatkan efektivitas sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

7. *Determinants of Corporate Value: Sustainability Reporting, Intellectual Capital, and Good Corporate Governance in Manufacturing Companies in Indonesia* oleh Nurul Aini, Lilik Pirmaningsih, Novaldy Arief Pradika, Elizabeth Dellysiana, dan Ratna Madudari (2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini, Lilik Pirmaningsih, Novaldy Arief Pradika, Elizabeth Dellysiana, dan Ratna Madudari (2024) dengan judul penelitian “*Determinants of Corporate Value: Sustainability Reporting, Intellectual Capital, and Good Corporate Governance in Manufacturing Companies in Indonesia*” bertujuan Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *sustainability reporting*, *intellectual capital*, dan *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 25. Sampel terdiri dari 87 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sustainability reporting*, *intellectual capital*, dan *good corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit dan komisaris independen berpengaruh signifikan. Persamaan penelitian sama-sama membahas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai faktor penting dalam meningkatkan

nilai dan kinerja perusahaan. Perbedaan penelitian, penelitian ini meneliti pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur secara kuantitatif, sedangkan penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip GCG (terutama *responsibility*, *accountability*, dan *transparency*) pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon secara kualitatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

8. Integrating Business Ethics into Occupational Health and Safety oleh Stavroula Mixafenti, Aristi Karagkouni dan Dimitrios Dimitriou (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Stavroula Mixafenti, Aristi Karagkouni dan Dimitrios Dimitriou (2024) dengan judul “Integrating Business Ethics into Occupational Health and Safety” bertujuan untuk menganalisis integrasi etika bisnis dan OHS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika dan governance meningkatkan keselamatan kerja. Sama-sama meneliti dan membahas keselamatan kerja. Perbedaannya penelitian ini tidak membahas perusahaan tertentu sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas mengenai suatu perusahaan.

9. Risk Management in Corporate Governance oleh Adrian-Cosmin Caraiman & Dorel Mates (2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Adrian-Cosmin Caraiman & Dorel Mates (2020) dengan judul “*Risk Management in Corporate Governance*”

bertujuan untuk Menjelaskan peran dan posisi manajemen risiko dalam penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), serta mengidentifikasi tahapan proses manajemen risiko dalam organisasi. Penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis konseptual terhadap literatur, standar strategis manajemen risiko, dan praktik tata kelola korporat di lembaga publik serta perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang efektif. Penerapan manajemen risiko yang baik meningkatkan efektivitas internal control, kinerja. Persamaannya sama-sama membahas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan organisasi, serta menyoroti pentingnya pengendalian risiko sebagai bagian dari tanggung jawab manajemen. Perbedaan penelitian ini berfokus pada hubungan antara manajemen risiko dan tata kelola perusahaan secara umum di organisasi internasional, sedangkan penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip GCG (khususnya *responsibility*, *accountability*, dan *transparency*) di Divisi K3 PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon untuk meningkatkan efektivitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

10. ***The Moderate Effect of Good Corporate Governance on Carbon Emission Disclosure and Company Value* oleh Jhon Urasti Blesia, Enggelina Trapen, dan Rama Soyan Arunglamba (2023).**

Penelitian yang dilakukan oleh Jhon Urasti Blesia, Enggelina Trapen, dan Rama Soyan Arunglamba (2023) dengan judul “*The Moderate Effect of Good Corporate Governance on Carbon Emission Disclosure and*

Company Value” bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan dengan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai variabel moderasi pada perusahaan jasa energi di Indonesia. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Sampel terdiri dari 20 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2015–2021. Hasil menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, namun *Good Corporate Governance* tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Persamaannya sama-sama meneliti prinsip *Good Corporate Governance* serta kaitannya dengan peningkatan nilai perusahaan dan aspek keberlanjutan lingkungan. Perbedaannya terletak pada fokus variabel moderasi yaitu GCG terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip GCG (akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan kewajaran) dalam konteks divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan K3.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No (1)	Judul Penelitian, Oleh, dan Tahun (2)	Tujuan (3)	Metode (4)	Hasil (5)	Kesamaan (6)	Perbedaan (7)
1	Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Semen Indonesia. Nugraha dan Wibowo, (2020)	Bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan K3 di PT Semen Indonesia.	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan K3 di PT Semen Indonesia telah berjalan dengan baik, tercermin dari penurunan	Persamaan dengan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa adalah keduanya menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dalam konteks K3.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan industri yang berbeda, di mana PT Semen Indonesia bergerak di industri semen, sedangkan PT Putra Steelindo Perkasa bergerak di industri baja.

				angka kecelakaan kerja dan peningkatan produktivitas karyawan.		
2	<i>Implementasi Environment, Occupational Health and Safety, Stakeholder's Engagement dan Corporate Governance</i>	Bertujuan untuk menganalisis penerapan GCG yang terintegrasi dengan OHS pada industri pertambangan	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik mendukung peningkatan keselamatan kerja dan	Persamaan dengan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa adalah keduanya sama- sama membahas GCG dan	Perbedaannya terletak pada objek penelitian sektor pertambangan, sedangkan penelitian ini pada industri baja

	dalam Kaidah Pertambangan – Sukmawan Nurhamda (2025)			kepatuhan regulasi	keselamatan kerja (K3)	
3	Implementasi Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pratama dan Sukardi, (2020)	Bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip- prinsip GCG dan manajemen risiko pada PT Krakatau Steel.	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Krakatau Steel telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko yang	Persamaan dengan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa adalah keduanya menganalisis implementasi GCG pada	Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian, di mana penelitian Pratama dan Sukardi mencakup manajemen risiko secara

				terintegrasi dalam kegiatan operasionalnya, termasuk pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	perusahaan yang bergerak di industri baja dan memiliki fokus pada aspek K3.	lebih luas, sedangkan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa lebih spesifik pada penerapan GCG di divisi K3.
4	Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan	Bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan risiko	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG dalam	Persamaan dengan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa adalah	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Wulandari dan

	Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Petrokimia Gresik. Wulandari dan Suharno (2020)	K3 di PT Petrokimia Gresik.	data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.	pengelolaan risiko K3 di PT Petrokimia Gresik telah berjalan dengan baik, tercermin dari penurunan angka kecelakaan kerja dan peningkatan kualitas lingkungan kerja.	keduanya menganalisis implementasi prinsip-prinsip GCG dalam konteks K3.	Suharno berfokus pada pengelolaan risiko K3, sedangkan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa berfokus pada divisi K3 secara keseluruhan.
--	--	------------------------------------	--	---	---	--

5	Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. XYZ Andrew F.C. Silalahi (2023)	Bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap kinerja K3 pada perusahaan industri	Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja K3 dan kepatuhan pekerja	Persamaan dengan penelitian pada PT Putra Steelindo Perkasa adalah keduanya sama-sama mengkaji prinsip GCG dalam konteks K3.	Perbedaannya penelitian ini yaitu penelitian ini kuantitatif, sedangkan penelitian penulis bersifat kualitatif
6	Board Size, Board	Untuk menganalisis	Penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan	Sama-sama meneliti dan	Penelitian ini dilakukan dengan

	Independence and Occupational Health and Safety Risk Management Performance – (2025)	pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen risiko OHS		bahwa mekanisme GCG berpengaruh terhadap kinerja OHS	membahas GCG dan keselamatan kerja	menggunakan objek penelitian perusahaan internasional sedangkan penelitian ini dilakukan secara kualitatif pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon dengan fokus pada implementasi prinsip GCG
--	--	---	--	---	--	---

						untuk meningkatkan efektivitas sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
7	<i>Determinants of Corporate Value: Sustainability Reporting, Intellectual Capital, and Good Corporate Governance in</i>	Untuk menguji dan menganalisis pengaruh <i>sustainability reporting, intellectual capital, dan good corporate governance</i>	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 25. Sampel terdiri dari 87 perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>sustainability reporting, intellectual capital, dan good corporate governance</i>	Sama-sama membahas penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sebagai faktor penting dalam	Penelitian ini meneliti pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur secara kuantitatif,

	<i>Manufacturing Companies in Indonesia</i> oleh Nurul Aini, Lilik Pirmaningsih, Novaldy Arief Pradika, Elizabeth Dellysiana, dan Ratna Madudari (2024).	terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia.	manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023.	yang diproksikan dengan komite audit dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.	meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan.	sedangkan penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip GCG (terutama <i>responsibility</i>, <i>accountability</i>, dan <i>transparency</i>) pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon secara kualitatif
--	---	---	---	--	---	--

						untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
8	Integrating Business Ethics into Occupational Health and Safety – (2024)	Menganalisis integrasi etika bisnis dan OHS	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif literatur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika dan governance meningkatkan keselamatan kerja	Sama-sama meneliti dan membahas keselamatan kerja	Penelitian ini tidak membahas perusahaan tertentu sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas

						mengenai suatu perusahaan
9	<i>Risk Management in Corporate Governance</i> oleh Adrian-Cosmin Caraiman & Dorel Mates (2020).	Menjelaskan peran dan posisi manajemen risiko dalam penerapan tata kelola perusahaan (<i>corporate governance</i>), serta mengidentifikasi tahapan proses manajemen risiko dalam organisasi.	Penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis konseptual terhadap literatur, standar strategis manajemen risiko, dan praktik tata kelola korporat di lembaga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang efektif. Penerapan manajemen risiko yang	Sama-sama membahas penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan organisasi, serta menyoroti pentingnya	Penelitian ini berfokus pada hubungan antara manajemen risiko dan tata kelola perusahaan secara umum di organisasi internasional, sedangkan penelitian ini difokuskan pada

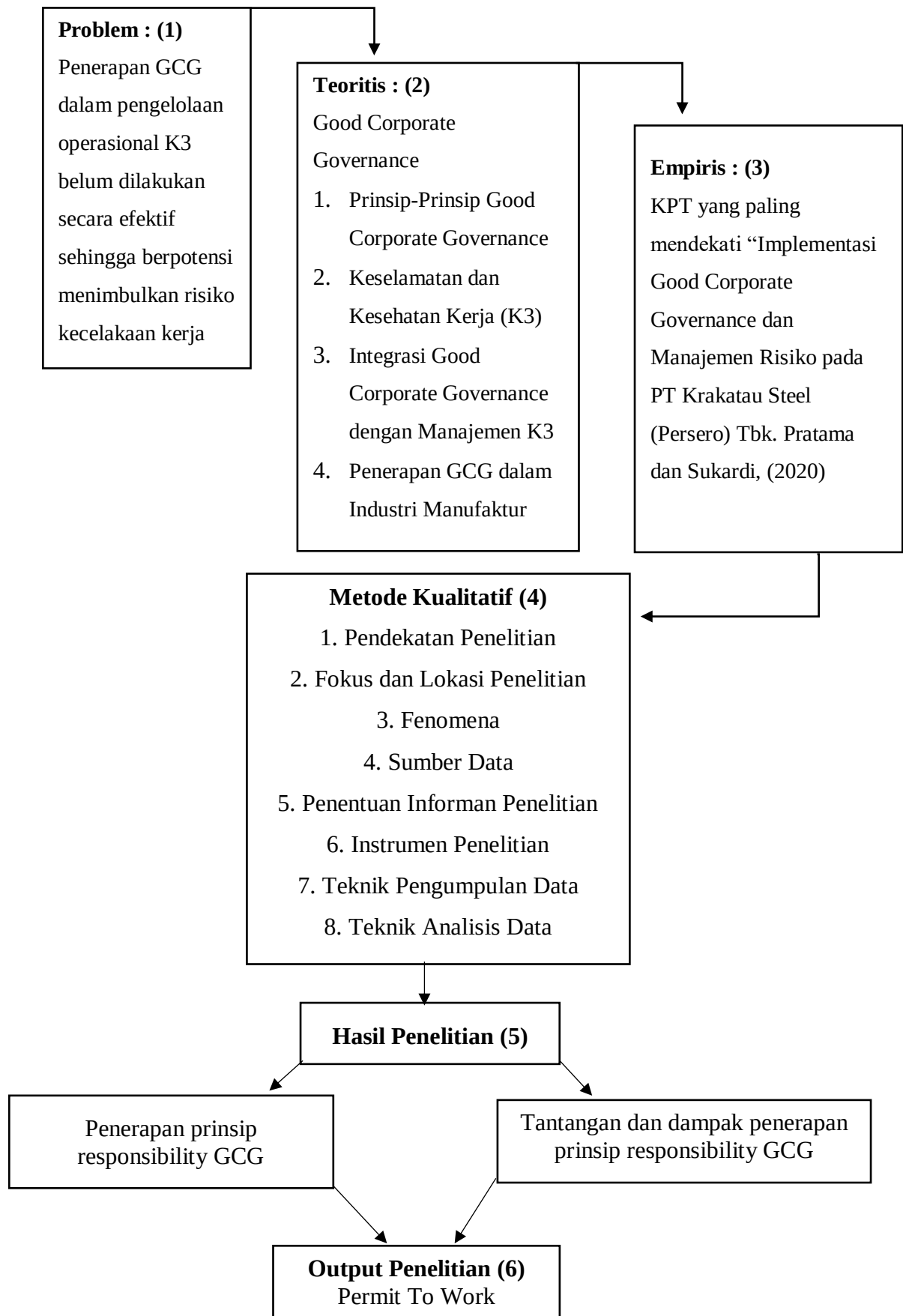
			publik serta perusahaan.	baik meningkatkan efektivitas internal control, kinerja organisasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola perusahaan.	pengendalian risiko sebagai bagian dari tanggung jawab manajemen.	penerapan prinsip-prinsip GCG (khususnya <i>responsibility</i> , <i>accountability</i> , dan <i>transparency</i>) di Divisi K3 PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon untuk meningkatkan efektivitas keselamatan dan
--	--	--	--------------------------	---	---	--

						kesehatan kerja (K3).
10	<i>The Moderate Effect of Good Corporate Governance on Carbon Emission Disclosure and Company Value</i> oleh Jhon Urasti Blesia, Enggelina Trapen, dan Rama Soyan	Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan dengan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sebagai variabel moderasi pada perusahaan	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> . Sampel terdiri dari 20 perusahaan sektor energi yang terdaftar di	Hasil menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, namun <i>Good Corporate Governance</i>	Sama-sama meneliti prinsip <i>Good Corporate Governance</i> serta kaitannya dengan peningkatan nilai perusahaan dan aspek keberlanjutan lingkungan.	Perbedaananya terletak pada fokus variabel moderasi yaitu GCG terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip GCG

	Arunglamba (2023).	jasa energi di Indonesia.	BEI periode 2015–2021.	tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.		(akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan kewajaran) dalam konteks divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan K3.
--	-----------------------	------------------------------	---------------------------	--	--	--

2.3 Alur Kerangka Penelitian

Dalam menjelaskan masalah penelitian, peneliti menggunakan kerangka penelitian yang terdiri dari elemen-elemen utama sebagai dasar pemikiran, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian akhir ini, penulis memilih untuk menerapkan pendekatan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh individu dan sistem yang dapat dilihat. Pendekatan penelitian kualitatif dijelaskan sebagai tahapan penelitian untuk memahami peristiwa yang akan dialami oleh subjek penelitian: perubahan, perbandingan, dengan cara menceritakan dalam bentuk kata-kata serta bahasa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan, Penelitian lapangan mengacu pada teknik pengumpulan data secara kualitatif. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati keadaan yang alami.

Penulis melakukan serangkaian pengamatan selama lima bulan program magang di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis berusaha untuk menganalisis secara mendalam proses K3 yang berlangsung di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Dalam rangka penelitian ini, metode kualitatif deskriptif diterapkan untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan mendalam mengenai fenomena yang ingin diungkap. Sasaran utamanya adalah untuk memahami dengan lebih jelas dan detail tentang keunikan serta karakteristik individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan tersebut, penulis mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai fenomena yang

sedang dikaji, tanpa menitikberatkan pada pengujian hipotesis atau hubungan antar variabel.

Penelitian kualitatif memerlukan partisipasi peneliti untuk memahami latar, keadaan, serta pengaturan peristiwa yang sedang dikaji. Setiap kejadian yang diperhatikan dalam studi kualitatif memiliki karakteristik dan ketidaksamaan yang disebabkan oleh konteks yang berbeda. Sasaran dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai situasi dalam suatu konteks yang nyata. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lokasi penelitian.

3.2 Fokus dan Lokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan dan kebijakan operasional Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Fokus utama mencakup lima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (keadilan), yang diterapkan dalam konteks pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diinternalisasi dalam sistem kerja, prosedur operasional, serta budaya organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Pendekatan field research digunakan karena memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam konteks lapangan, mengamati interaksi sosial, sistem kerja, dan pelaksanaan kebijakan secara langsung di lokasi penelitian.

Lokus penelitian ini adalah Divisi K3 PT. Putra Steelindo Perkasa yang berlokasi di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai salah satu unit strategis yang bertanggung jawab terhadap penerapan kebijakan keselamatan kerja perusahaan. Divisi ini dipilih karena peranannya yang sangat penting dalam menjamin kepatuhan terhadap standar keselamatan, baik berdasarkan regulasi internal maupun eksternal, mengingat perusahaan bergerak di sektor industri logam yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi di lokasi ini, peneliti berupaya memperoleh data empiris mengenai bagaimana prinsip-prinsip GCG diaktualisasikan dalam pengelolaan K3. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai penerapan GCG dalam mendukung budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan di lingkungan industri manufaktur.

3.3 Fenomena Penelitian

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mendukung efektivitas sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di sektor industri manufaktur, khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang baja dan konstruksi seperti PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Dalam praktiknya, Divisi K3 memiliki peran strategis dalam menjamin keselamatan tenaga kerja, mencegah kecelakaan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta produktif. Namun, dalam beberapa kasus di industri serupa, sering ditemukan bahwa meskipun kebijakan K3 sudah dirancang sesuai standar, pelaksanaan di lapangan tidak selalu konsisten atau tidak

sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip GCG, seperti keterbukaan informasi (transparansi), kejelasan tanggung jawab (akuntabilitas), dan komitmen terhadap etika dan regulasi (responsibilitas).

Fenomena ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal perusahaan dengan praktik aktual yang terjadi di unit kerja, terutama dalam aspek pengambilan keputusan, pengawasan internal, dan partisipasi tenaga kerja dalam sistem K3. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam konteks nyata di Divisi K3, serta bagaimana budaya organisasi, struktur kepemimpinan, dan kepatuhan terhadap regulasi eksternal turut mempengaruhi proses tersebut. Dengan pendekatan field research, peneliti dapat mengamati langsung dinamika yang terjadi di lapangan, berinteraksi dengan pihak-pihak terkait, serta memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor yang membentuk penerapan GCG dalam pengelolaan K3. Pemahaman terhadap fenomena ini sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan dan perbaikan sistem yang lebih berkelanjutan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan kerja.

3.4 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif field research. Data primer diperoleh langsung dari hasil interaksi peneliti di lapangan dengan subjek penelitian, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Informan utama

meliputi manajer atau kepala divisi operasional, supervisor lapangan, serta staf pelaksana dan teknisi operasional. Mereka merupakan pihak yang memiliki pengalaman langsung terhadap kebijakan dan implementasi sistem kerja yang berkaitan dengan GCG, sehingga informasi yang diberikan relevan untuk menggambarkan kondisi nyata penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi perusahaan dan arsip internal yang berkaitan dengan GCG dan K3, seperti Standard Operating Procedures (SOP), pedoman pelaksanaan GCG, laporan audit internal, data inspeksi dan kecelakaan kerja, serta notulen rapat keselamatan. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan data dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan GCG dan K3 sebagai bahan pelengkap dalam menganalisis kesesuaian antara praktik di lapangan dan regulasi yang berlaku. Kombinasi antara data primer dan sekunder ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, mendalam, dan kontekstual mengenai bagaimana prinsip-prinsip GCG diterapkan secara nyata dalam pengelolaan K3 di lingkungan perusahaan.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive atau bertujuan, sesuai dengan karakteristik metode kualitatif field research yang menekankan pada kedalaman informasi daripada jumlah responden. Informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT. Putra

Steelindo Perkasa Cilegon. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini antara lain, memiliki jabatan atau fungsi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan atau pelaksanaan sistem K3, memahami kebijakan internal perusahaan terkait GCG dan bersedia memberikan informasi yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan utama dalam penelitian ini terdiri dari manajer atau kepala divisi operasional, yang berperan dalam perumusan dan pengawasan kebijakan K3, serta supervisor dan teknisi operasional yang bertanggung jawab atas implementasi program keselamatan di lapangan. Selain itu, informan tambahan dapat mencakup pegawai operasional yang dapat memberikan perspektif pelaksana terhadap bagaimana prinsip GCG diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Peneliti akan menyesuaikan jumlah informan berdasarkan prinsip kecukupan data (data saturation), yaitu pada titik di mana informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi memberikan temuan baru yang signifikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan informasi yang dikumpulkan benar-benar mendalam, kontekstual, dan relevan dengan fokus penelitian.

Dengan menggunakan Teknik purposive, diharapkan penulis dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penulis melalui informan yang dipilih dengan cermat berdasarkan kriteria yang relevan. Kriteria yang dimaksud adalah:

- 1) Keahlian dan pengalaman

Informan ditentukan dengan keahlian dan pengalaman yang relevan, dengan pertimbangan:

- a) Lama waktu bekerja <5 tahun
- b) Memiliki pengetahuan yang luas mengenai proses operasional di PT Putra Steelindo Cilegon

2) Posisi dan Peran

Penentuan informan-informan yang berada dalam posisi atau peran yang relevan sehingga memahami proses operasional yang ada di PT. Putra Steelindo Cilegon yaitu:

- a. Bapak Unggul Yudo selaku Kepala Divisi K3 yang mengawasi operasi harian dan memastikan kelancaran fungsi proses bisnis.
- b. Bapak Asep Sunandar selaku staf operasional mesin tolling yang mengetahui proses kerja dan bertanggungjawab pada mesin tolling.
- c. Bapak Jaeni selaku staf operasional mesin slitting yang mengetahui proses kerja dan bertanggungjawab pada mesin slitting.

3) Akses ke Data dan Informasi

Informan yang dipilih berada di ruang lingkup operasional PT Putra Steelindo Cilegon yang memiliki akses ke data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

4) Ketersediaan dan Kerjasama

Informan bersedia berpartisipasi dan memiliki ketersediaan waktu yang cukup untuk menjadi informan.

Berdasarkan syarat tersebut didapatkan beberapa informan yang memenuhi kriteria di atas, dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Informan dalam Penelitian

No	Nama	Kode Informan	Jabatan
1.	Unggul Yudo (<i>key informan</i>)	A-1	Kepala Divisi K3
2.	Asep Sunandar	A-2	Staf Mesin Tolling
3.	Jaeni	A-3	Staf Mesin Slitting

Sumber: Data Penelitian

Key informan pada penelitian berikut adalah Pak Yudo yang merupakan Kepala Divisi K3.

3.6 Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan dan memperkaya informasi demi pelaksanaan penelitian ini. Pada alat yang digunakan penulis, penulis memanfaatkan perangkat pendukung seperti telepon genggam, laptop, dan kertas. Namun, penulis lebih banyak mengandalkan kemampuan pribadi dalam berfungsi sebagai instrumen dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti banyak memanfaatkan keterampilan komunikasi dan juga dirinya sendiri dalam mengumpulkan serta memproses data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen terkait alur distribusi yang terdapat di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan studi dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis:

1. Penelitian Lapangan (Field research)

Penelitian lapangan melibatkan kegiatan penelitian di lokasi objek penelitian. Penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan pimpinan dan beberapa staf untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan:

- a. Observasi: Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses pendistribusian di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon yang terletak di Cilegon. Proses operasional yang belum efektif terutama pada kegiatan K3 dikarenakan belum adanya pedoman kebijakan terkait K3.
- b. Wawancara: Penulis melakukan tanya jawab dengan Bapak Yudo selaku kepala divisi operasional yang terlibat langsung dalam proses operasional di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon dan Bapak Asep Sunandar yang berkaitan langsung di mesin tolling serta Bapak Jaeni selaku staff mesin slitting.

2. Studi Literatur

Penulis melakukan literatur untuk memperoleh landasan teori mengenai proses pendistribusian. Data ini diperoleh melalui buku literatur dan catatan perkuliahan lainnya.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah krusial dalam suatu penelitian yang mencakup pengumpulan, pengelompokan, dan penafsiran data yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta sumber lainnya. Proses ini dilaksanakan secara terstruktur untuk memperdalam pemahaman peneliti mengenai subjek yang diteliti dan menyampaikan hasil yang dapat dimengerti oleh orang lain. Dalam analisis data, hasil dari observasi dan wawancara ditelaah secara mendetail untuk menemukan pola, kecenderungan, dan hasil yang ada. Data yang telah dianalisis kemudian diatur dan disajikan dengan cara yang jelas dan menyeluruh untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tema penelitian kepada audiens atau individu yang berminat. Di samping itu, analisis data juga mencakup usaha untuk menemukan makna yang terdapat dalam data tersebut guna memperdalam pemahaman yang lebih signifikan.

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi (Sugiyono, 2017: 134).

1) Reduksi data

Prosedur ini mencakup peringkasan, pemilihan dalam proses analisis data berfokus pada aspek-aspek krusial dan menekankan elemen-elemen yang penting. Pada tahap pengurangan data, informasi yang relevan dan signifikan dipilih serta ditekankan, sementara data yang kurang relevan atau yang tidak memberikan kontribusi yang berarti dihilangkan. Langkah ini membantu menciptakan gambaran yang lebih jelas dan terarah, sehingga mempermudah penulis dalam proses

pengumpulan data yang berikutnya. Dengan mengurangi jumlah data yang perlu dianalisis, penulis dapat lebih terfokus pada elemen-elemen yang paling penting dan relevan dalam studi ini, sehingga mendukung pengembangan pemahaman yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, ini juga berkontribusi pada pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti dengan perencanaan tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut.

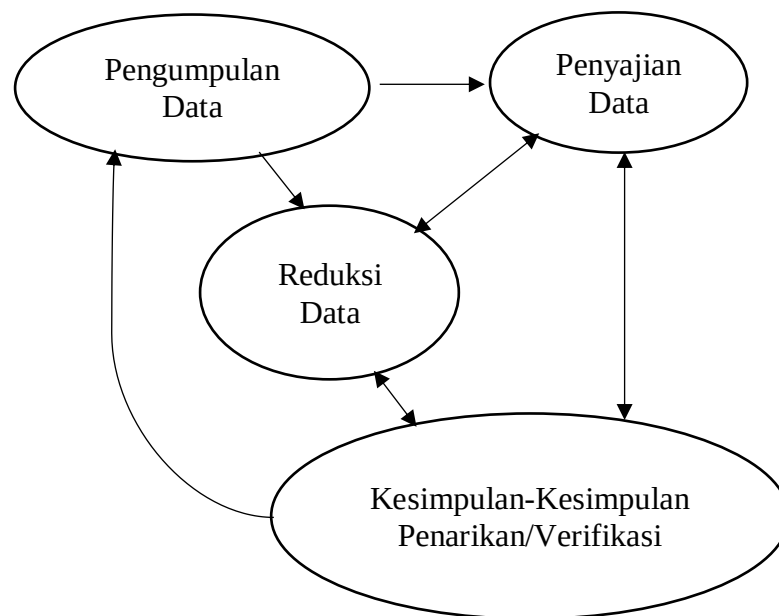
2) Penyajian Data

Data disajikan dengan mengorganisasi informasi dalam format yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pelaksanaan tindakan. Penyampaian data kualitatif bisa berupa teks narasi, matriks, grafik, jaringan, atau diagram. Format-format ini digunakan untuk menyatukan informasi secara sistematis, sehingga mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang sedang dianalisis dan mendukung analisis lebih dalam. Dengan cara tersebut, data disajikan dengan cara yang memungkinkan untuk mengevaluasi hubungan pola, atau kecenderungan yang terdapat dalam data, sekaligus untuk menyampaikan hasil penelitian dengan jelas dan menyeluruh kepada pihak yang berkepentingan atau terlibat dalam studi.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkesinambungan oleh peneliti selama penelitian berlangsung.. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha menemukan makna, mencatat pola, penjelasan,

struktur, serta hubungan sebab-akibat yang mungkin berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Kesimpulan ini digunakan dengan cara yang fleksibel, terbuka, dan skeptis, tetapi tetap memberikan pedoman awal. Kesimpulan tersebut terus disempurnakan dan diperiksa melalui berbagai proses seperti refleksi ulang, peninjauan catatan lapangan, diskusi dengan kolega, dan upaya untuk mengaitkan hasil dengan data lainnya.



Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data Kualitatif

3.9 Triangulasi Data

Metode validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memastikan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau metode lain di luar data itu sendiri sebagai perbandingan atau pemeriksaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berfungsi untuk memverifikasi keandalan data dengan cara memeriksa informasi yang didapat dari beberapa sumber yang berbeda. Dengan mengevaluasi data dari berbagai sumber, peneliti bisa mendapatkan validitas dan konsistensi data yang lebih tinggi.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik digunakan untuk mengecek kredibilitas data dengan menerapkan metode yang berbeda dari sumber yang sama. Misalnya data yang didapatkan dari kegiatan observasi kemudian diverifikasi dengan wawancara.

3) Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan uji keabsahan data menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda. Sehingga menghasilkan jawaban dengan berbagai bentuk jawaban yang berbeda sesuai kebutuhan penelitian.

Penulis membandingkan data menggunakan triangulasi sumber data dan metode untuk melakukan validasi data dengan triangulasi sumber dari ketiga informan yang telah tercatat diatas. Bukti penggunaan triangulasi yang digunakan pada sumber adalah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berbeda. Narasumber tersebut berasal dari PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon langsung. Wawancara dilakukan dengan kepala divisi operasional yaitu bapak Yudo. Selain itu, staff dari mesin tolling yaitu bapak Asep Sunandar. Sumber terakhir terdapat

staff dari mesin slitting bapak Jaeni. Setiap sumber yang berbeda menghasilkan sudut pandang dan jawaban yang berbeda dalam menggambarkan situasi. Disanalah dapat dilihat satu jawaban yang sama terkait penelitian yang penulis lakukan.

Triangulasi metode yang diterapkan lainnya untuk memvalidasi adalah dalam cara pengumpulan data. Peneliti menerapkan berbagai metode untuk memperoleh hasil yang tepat. Penulis memanfaatkan wawancara dan pengumpulan informasi dari data perusahaan. Teknik yang beragam ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi peneliti untuk mendapatkan dan mengevaluasi perbandingan setiap informasi yang diperoleh sebelum akhirnya membuat kesimpulan.

Dengan adanya triangulasi tersebut, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang melibatkan penggunaan berbagai sumber informasi untuk memverifikasi keabsahan data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan Adalah akurat dan dapat diandalkan. Triangulasi sumber membantu peneliti untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Tabel 3. 2 Tabel Keabsahan Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban		
		A1	A2	A3
1	Apa bentuk tanggung jawab manajemen dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja	Manajemen memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan setiap aktivitas kerja berjalan sesuai dengan standar	Tanggung jawab manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja diwujudkan melalui pengawasan langsung terhadap implementasi	Manajemen bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan kegiatan operasional perusahaan.

	karyawan sehari-hari?	keselamatan yang telah ditetapkan. Bentuk tanggung jawab tersebut antara lain dengan menyediakan peralatan pelindung diri (APD) yang lengkap dan layak digunakan, melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi peralatan kerja, serta menegakkan aturan keselamatan secara konsisten	kebijakan K3 di lapangan. Manajemen memastikan setiap supervisor dan karyawan menerapkan prosedur keselamatan, serta menindaklanjuti setiap temuan atau potensi bahaya dengan cepat. Namun, hingga saat ini kewajiban untuk menyediakan sarana kesehatan, seperti ruang P3K dan tenaga medis perusahaan, sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan pekerja belum terlaksana.	
2	Bagaimana perusahaan menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran prosedur keselamatan di lapangan?	Selama ini, kalau ada pelanggaran prosedur keselamatan di lapangan, perusahaan belum punya tindak lanjut yang jelas atau terstruktur. Biasanya hanya diingatkan secara lisan oleh atasan atau pengawas tanpa ada tindakan lanjutan. Belum ada sistem sanksi atau evaluasi khusus untuk menindak pelanggaran tersebut.	Perusahaan belum memiliki prosedur tetap dalam menindaklanjuti pelanggaran keselamatan kerja. Kalau ada karyawan yang melanggar aturan, biasanya cuma ditegur secara langsung tanpa ada laporan resmi.	Untuk saat ini, perusahaan belum melakukan tindak lanjut yang tegas terhadap pelanggaran prosedur keselamatan di lapangan. Biasanya hanya sebatas peringatan lisan dari pengawas, tanpa ada catatan atau evaluasi lebih lanjut.
3	Apakah perusahaan memiliki	Perusahaan saat ini belum memiliki	Tidak ada program lingkungan yang khusus diterapkan	Perusahaan belum memiliki program formal yang

	program khusus untuk meminimalkan dampak operasional terhadap lingkungan sekitar?	program khusus yang secara spesifik difokuskan untuk meminimalkan dampak operasional terhadap lingkungan sekitar. Namun demikian, perusahaan tetap berupaya menjaga kebersihan area kerja dan lingkungan sekitar dengan menginstruksikan karyawan agar tidak membuang limbah sembarangan serta memastikan area produksi tetap tertata dengan baik.	oleh perusahaan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Upaya yang dilakukan baru sebatas menjaga kebersihan area kerja dan memastikan limbah produksi tidak menimbulkan gangguan langsung bagi masyarakat sekitar	berfokus pada pengurangan dampak lingkungan. Aktivitas operasional masih berjalan berdasarkan prosedur standar yang mengutamakan efisiensi dan keselamatan kerja, tetapi belum secara eksplisit mencakup aspek pengelolaan lingkungan
4	Bagaimana bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab social terkait K3?	Perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial di bidang K3 dengan memastikan seluruh karyawan mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dalam bekerja	Perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan mengacu pada standar K3 yang berlaku.	Komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial terkait K3 tercermin dari keterlibatan manajemen dalam setiap kegiatan keselamatan. Manajemen turut memantau langsung pelaksanaan kebijakan K3 di lapangan, serta menindaklanjuti setiap laporan insiden atau kondisi berbahaya
5	Apa saja pelatihan K3 yang diberikan perusahaan	Sampai saat ini perusahaan belum pernah memberikan	Hingga saat ini, perusahaan belum pernah melaksanakan	Perusahaan belum memiliki program pelatihan K3 yang terstruktur maupun

	kepada karyawan untuk mendukung penerapan prinsip responsibility?	pelatihan K3 secara resmi kepada karyawan. Informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja biasanya hanya disampaikan secara lisan oleh supervisor saat briefing pagi.	pelatihan K3 secara khusus bagi karyawan. Pengetahuan mengenai keselamatan kerja masih disampaikan secara informal melalui arahan dari atasan atau pengawas lapangan	rutin. Karyawan hanya memperoleh pemahaman dasar mengenai keselamatan kerja melalui pengarahan singkat sebelum memulai pekerjaan.
6	Bagaimana perusahaan memastikan seluruh pekerja memahami hak dan kewajiban mereka terkait K3?	Perusahaan memastikan seluruh pekerja memahami hak dan kewajiban mereka terkait K3 melalui penyampaian langsung dari atasan atau pengawas lapangan. Setiap awal pekerjaan, pekerja diberikan pengarahan singkat mengenai pentingnya menjaga keselamatan, menggunakan alat pelindung diri, dan mengikuti prosedur kerja aman. Meskipun belum dilakukan secara formal dalam bentuk pelatihan, pengarahan rutin ini menjadi sarana utama untuk menanamkan pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban dalam K3.	Upaya perusahaan dalam memastikan pekerja memahami hak dan kewajiban terkait K3 dilakukan melalui sosialisasi internal yang disampaikan secara lisan. Pengawas lapangan biasanya memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab pekerja terhadap keselamatan kerja serta hak mereka untuk bekerja dalam kondisi aman.	Perusahaan belum memiliki sistem formal seperti pelatihan atau modul khusus mengenai hak dan kewajiban K3. Namun, pemahaman tersebut diberikan secara sederhana melalui briefing sebelum memulai pekerjaan. Dalam kegiatan tersebut, pengawas memberikan instruksi mengenai penggunaan APD, kewajiban mematuhi aturan keselamatan, serta hak pekerja untuk melaporkan potensi bahaya di tempat kerja.

7	Sejauh mana manajemen terlibat langsung dalam pengawasan implementasi K3 di lapangan?	Peran manajemen dalam mengawasi pelaksanaan K3 masih terbatas. Mereka belum terlibat secara langsung dan rutin untuk memastikan aturan keselamatan benar-benar dijalankan. Biasanya manajemen baru turun tangan kalau ada masalah atau insiden di lapangan, bukan sebagai bagian dari pengawasan harian.	Selama ini, pengawasan dari manajemen terhadap pelaksanaan K3 belum terlalu aktif. Manajemen lebih banyak memberikan arahan secara umum, tapi jarang melakukan pengecekan langsung ke lapangan.	Keterlibatan manajemen dalam pengawasan implementasi K3 bisa dibilang masih lemah. Mereka belum melakukan pengawasan rutin atau inspeksi langsung ke lokasi kerja.
8	Apa saja hambatan yang sering dihadapi dalam menjalankan tanggung jawab K3, dan bagaimana solusinya?	Hambatan utama yang sering dihadapi dalam menjalankan tanggung jawab K3 adalah kurangnya kesadaran dan kedisiplinan karyawan dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja. Masih ada sebagian pekerja yang menganggap penggunaan alat pelindung diri (APD) tidak terlalu penting. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan pembinaan langsung di	Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan fasilitas pendukung K3, seperti APD yang kadang belum lengkap atau perlu diperbarui. Kondisi ini dapat menghambat penerapan K3 secara optimal. Sebagai solusi, manajemen berupaya menambah anggaran untuk pengadaan APD agar tetap layak pakai.	Dalam pelaksanaan tanggung jawab K3, hambatan lain yang sering ditemui adalah kurangnya komunikasi antara manajemen dan pekerja terkait pelaporan kondisi berbahaya di lapangan. Solusinya, perusahaan mulai mendorong budaya komunikasi terbuka dan memberikan pemahaman bahwa pelaporan potensi bahaya merupakan bagian dari tanggung jawab Bersama.

		lapangan dan memberikan teguran bagi karyawan yang melanggar, serta terus mengingatkan pentingnya keselamatan kerja dalam setiap briefing.		
9	Bagaimana perusahaan melakukan evaluasi efektifitas kebijakan K3 yang sudah diterapkan?	Selama ini perusahaan belum pernah melakukan evaluasi khusus terkait efektivitas kebijakan K3. Semua kegiatan berjalan seperti biasa tanpa ada peninjauan ulang atau penilaian sejauh mana aturan K3 sudah diterapkan dengan baik. Jadi bisa dibilang, belum ada proses evaluasi yang terstruktur dari manajemen.	Perusahaan belum punya mekanisme atau prosedur yang jelas untuk mengevaluasi kebijakan K3. Sampai sekarang, belum pernah dilakukan penilaian formal mengenai apakah kebijakan yang diterapkan sudah efektif atau belum.	perusahaan belum memiliki sistem evaluasi untuk mengukur seberapa efektif kebijakan K3 yang sudah ada. Semua berjalan berdasarkan kebiasaan dan pengalaman kerja sehari-hari, bukan dari hasil penilaian resmi.
10	Apakah ada bentuk penghargaan atau sanksi bagi karyawan terkait kepatuhan pada aturan K3?	Perusahaan belum memiliki sistem penghargaan yang formal bagi karyawan yang patuh terhadap aturan K3, namun bentuk apresiasi tetap diberikan secara lisan oleh atasan atau pengawas lapangan	perusahaan tidak menerapkan penghargaan khusus bagi karyawan yang taat terhadap K3. Namun, karyawan yang menunjukkan kepedulian dan kedisiplinan tinggi terhadap keselamatan biasanya mendapatkan penilaian positif dari atasan.	untuk penghargaan, perusahaan belum memiliki kebijakan khusus, tetapi sering memberikan pujian atau ucapan terima kasih secara informal bagi pekerja yang aktif menjaga keselamatan. Hal ini menjadi cara sederhana untuk memotivasi kepatuhan terhadap aturan K3. Terkait pelaporan insiden kerja masih sering

				tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang jelas, bahkan seringkali dianggap oleh manajemen sebagai pelanggaran ringan namun beresiko tinggi.
11	Apa langkah perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari prinsip responsibility?	Hingga saat ini, perusahaan belum menerapkan prinsip responsibility secara khusus dalam kebijakan kesejahteraan karyawan. Upaya peningkatan kesejahteraan masih dilakukan secara umum, seperti pemberian gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	Perusahaan belum memiliki kebijakan formal yang secara langsung mencerminkan prinsip responsibility dalam peningkatan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan pekerja masih sebatas pada pemenuhan kewajiban dasar, seperti pembayaran upah tepat waktu dan jaminan sosial	Penerapan prinsip responsibility di perusahaan belum berjalan secara nyata. Tidak terdapat program khusus yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
12	Bagaimana keterlibatan stakeholder (seperti Masyarakat sekitar atau pemerintah) dalam mendukung penerapan K3 di perusahaan?	Keterlibatan stakeholder dalam mendukung penerapan K3 di perusahaan masih bersifat terbatas. Pemerintah umumnya berperan dalam melakukan pengawasan melalui inspeksi atau kunjungan tertentu untuk memastikan perusahaan menjalankan aturan keselamatan kerja. Sementara itu, masyarakat sekitar belum terlibat secara	Peran stakeholder dalam penerapan K3 terutama datang dari instansi pemerintah, seperti Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Lingkungan Hidup, yang sesekali melakukan pembinaan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi K3.	Dalam penerapan K3, perusahaan mendapatkan dukungan terutama dari pihak pemerintah melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja.

		langsung, namun perusahaan tetap menjaga hubungan baik melalui komunikasi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.		
13	Menurut Anda, sejauh mana penerapan prinsip responsibility berdampak terhadap budaya keselamatan kerja di perusahaan?	penerapan prinsip responsibility belum terlihat secara jelas di perusahaan, sehingga dampaknya terhadap budaya keselamatan kerja juga belum terasa signifikan. Karyawan menjalankan kegiatan keselamatan kerja lebih karena arahan langsung dari atasan, bukan dari kesadaran tanggung jawab pribadi.	prinsip responsibility belum diterapkan secara formal di lingkungan perusahaan. Kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan kerja masih berjalan sebatas pemenuhan prosedur, bukan sebagai hasil dari penerapan nilai tanggung jawab.	Penerapan prinsip responsibility di perusahaan belum berjalan dengan optimal, bahkan bisa dikatakan belum diterapkan secara sistematis. Kesadaran mengenai pentingnya tanggung jawab dalam menjaga keselamatan kerja masih rendah, baik di tingkat manajemen maupun karyawan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya prinsip responsibility, pada Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi baja hollow, PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon menghadapi tantangan operasional dengan risiko tinggi. Latar belakang penelitian ini diambil dari pengamatan bahwa penerapan GCG dalam pengelolaan operasional K3 di perusahaan ini belum dilakukan secara efektif atau maksimal, yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan mengganggu pencapaian target perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip GCG diterapkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut.

4.1.1. Sejarah PT Putra Steelindo Perkasa

PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2018 berdasarkan Akte Pendirian Nomor 16 tanggal 20 Maret 2018 di bawah notaris Hj. Juriah Sadeli, SH. Sejak awal berdiri, perusahaan ini berfokus pada bidang industri baja dan logam, sejalan dengan potensi kawasan Cilegon yang dikenal sebagai pusat industri baja di Indonesia. Pada masa pendiriannya, komposisi kepemilikan saham didominasi oleh Safril Malik selaku Direktur Utama dengan kepemilikan sebesar 90%. Sementara itu, Munarsih MY menjabat sebagai

Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 5%, dan Unggul Yudo P sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebesar 5%. Struktur kepemilikan ini menjadi pondasi awal dalam mengembangkan arah dan strategi perusahaan.

Seiring perkembangan bisnis dan kebutuhan untuk memperkuat struktur kepemilikan, pada tahun 2020 PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon melakukan perubahan melalui proses akuisisi. Perubahan tersebut tercatat dalam Akte Perubahan Nomor 1761 tanggal 31 Oktober 2020 di bawah notaris Irwan Sugandi, SH, M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan resmi melalui SK Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-AH.01.03.0410417 tanggal 23 November 2020. Dengan adanya akuisisi ini, terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham, di mana Safril Malik selaku Direktur kini memiliki porsi saham sebesar 50%, dan Mitologenta masuk sebagai Komisaris dengan porsi kepemilikan saham sebesar 50%.

Perubahan kepemilikan tersebut menjadi tonggak penting bagi perusahaan dalam memperkuat struktur organisasi serta memperluas jangkauan bisnisnya. Dengan dukungan kepemilikan saham yang lebih seimbang, PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon terus berupaya meningkatkan kinerja, memperluas jaringan, serta berkontribusi dalam industri baja di Indonesia.

4.1.2. Visi dan Misi PT Putra Steelindo Perkasa

4.1.2.1. Visi PT Putra Steelindo Perkasa

Menjadikan perusahaan PT. Putra Steelindo Perkasa menjadi perusahaan terbaik dalam hal penjualan, produksi dan jasa yang mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat.

4.1.2.2. Misi PT Putra Steelindo Perkasa

Dengan fokus pada produktivitas dan masyarakat, perusahaan menjalin kemitraan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok bahan baku dan penyalur produk. Perusahaan memproduksi berbagai jenis produk steel yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan mutu terbaik, harga dan pasokan yang berdaya saing tinggi melalui pengolahan profesional demi kepuasan pelanggan. Selain itu, perusahaan berusaha memberi penghargaan kepada stakeholder secara memadai, penyediaan lingkungan kerja yang aman dan memberi kesempatan untuk pengembangan karir. Keunggulan perusahaan ini adalah selalu memberikan perhatian yang tulus kepada masyarakat melalui pencipta lapangan kerja dan dukungan pembinaan sosial

4.1.3. Nilai dan Komitmen PT Putra Steelindo Perkasa

Nilai

“Menjunjung tinggi integritas, kualitas, inovasi dan profesionalisme”

Komitmen

“Kami memastikan pengelolaan usaha yang efisien, inovatif, serta bertanggung jawab dengan tujuan menciptakan manfaat jangka panjang bagi pelanggan, mitra, karyawan, dan lingkungan.”

4.1.4. Profil Perusahaan

PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri baja dengan fokus utama pada produksi material berbasis plat baja, terutama pipa kotak atau hollow. Sejak berdiri, perusahaan telah beroperasi selama kurang lebih tujuh tahun dan menunjukkan perkembangan yang konsisten.

Berlokasi di Cilegon, kawasan yang dikenal sebagai pusat industri baja di Indonesia, PT. Putra Steelindo Perkasa memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor konstruksi dan infrastruktur nasional.

Dalam perjalanannya, perusahaan berhasil memperluas jangkauan pasar hingga ke wilayah Banten dan Jawa Tengah, dengan rata-rata penjualan mencapai 200–300 ton produk baja per bulan. Angka ini mencerminkan kapasitas produksi yang stabil sekaligus kepercayaan dari para pelanggan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk-produk yang ditawarkan antara lain plat lembaran (sheet), CNP, UNP, pipa bulat, dan pipa kotak (hollow). Seluruh produk diproses dengan standar kualitas tinggi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan beragam sektor industri, mulai dari pembangunan perumahan, infrastruktur jalan, hingga kebutuhan manufaktur.



Gambar 4. 1 Logo PT Putra Steelindo Perkasa

Sumber: Dokumen Perusahaan

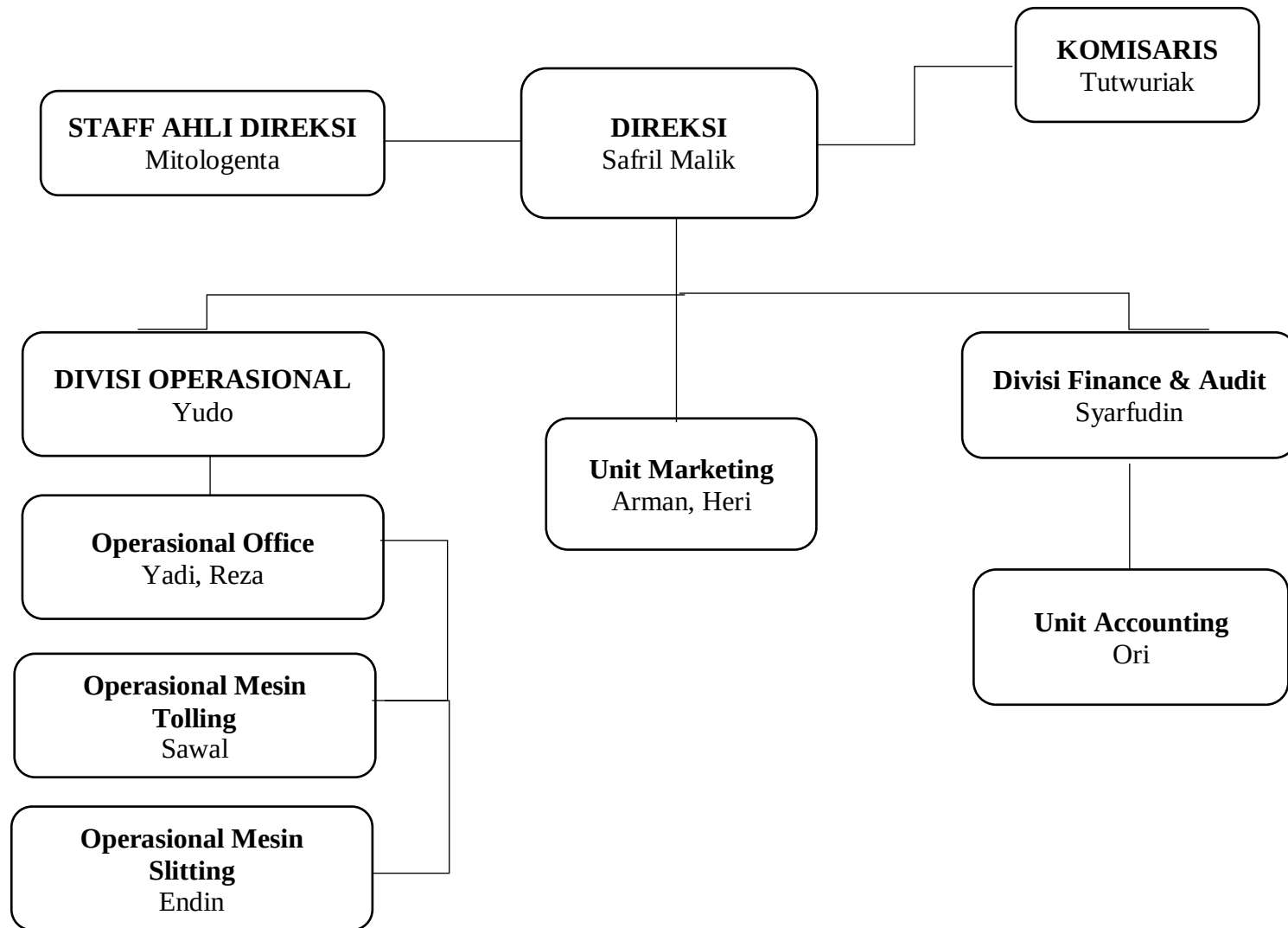
Perkembangan pesat sektor properti dan infrastruktur di Indonesia menjadi peluang yang sangat potensial bagi perusahaan. Peningkatan pembangunan perumahan baru dengan desain minimalis di berbagai daerah merupakan indikasi

kuat bahwa kebutuhan terhadap material baja akan terus meningkat. PT. Putra Steelindo Perkasa hadir sebagai mitra strategis yang menyediakan material konstruksi baja yang andal, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan pasar yang dinamis.

Selain mengutamakan kualitas produk, perusahaan juga menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan inovasi. Didukung oleh tenaga ahli berpengalaman, PT. Putra Steelindo Perkasa mengelola setiap lini bisnis secara profesional, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke pasar. Perusahaan juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan memastikan setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang berlaku.

Komitmen perusahaan tidak hanya berhenti pada penyediaan produk berkualitas, tetapi juga pada keberlanjutan bisnis yang berorientasi jangka panjang. Dengan harga yang kompetitif, pelayanan yang profesional, serta kepercayaan yang telah dibangun bersama pelanggan dan mitra usaha, PT. Putra Steelindo Perkasa bertekad untuk terus berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan properti dan infrastruktur di Indonesia.

4.1.5. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Perusahaan

4.1.6. Layanan Produk dan Jasa di PT Putra Steelindo Perkasa

4.1.6.1. Besi Hollo

PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon memiliki berbagai jenis produk baja yang digunakan secara luas dalam industri konstruksi maupun manufaktur. Salah satu produk utama yang dihasilkan adalah besi hollo, yaitu baja berbentuk kotak atau persegi panjang yang tersedia dalam beragam ukuran dan ketebalan. Produk ini banyak dipilih karena fleksibilitas penggunaannya, antara lain untuk pembuatan rangka atap, pagar, konstruksi bangunan, hingga komponen industri otomotif. Besi hollow yang diproduksi menggunakan bahan dasar galvanil maupun galvanis, sehingga memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap korosi dan dapat digunakan untuk kebutuhan konstruksi jangka panjang.

4.1.6.2. Besi Pipa

Perusahaan juga memproduksi besi pipa, yakni pipa baja berkualitas tinggi yang berfungsi sebagai elemen struktural maupun instalasi perpipaan. Besi pipa ini dirancang untuk mendukung berbagai keperluan teknis, baik di sektor konstruksi, infrastruktur, maupun industri yang memerlukan sistem distribusi fluida.

4.1.6.3. UNP (Profil Baja)

Produk berikutnya adalah UNP (profil baja) yang berbentuk menyerupai huruf “U” dan lazim digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi serta industri. Profil baja ini memiliki kekuatan struktural yang baik sehingga sering diaplikasikan sebagai penopang beban atau elemen rangka dalam pembangunan gedung maupun fasilitas industri.

4.1.6.4. Canal/UC

PT Putra Steelindo Perkasa juga memproduksi Canal/UC, yaitu profil baja yang sering digunakan sebagai struktur penunjang dalam proyek-proyek konstruksi. Produk ini berfungsi memperkuat bangunan sekaligus memberikan dukungan tambahan bagi elemen struktural lainnya, sehingga penggunaannya sangat penting dalam proyek berskala besar.

4.1.6.5. Plate Sheet & Coil

PT Putra Steelindo Perkasa juga memproduksi plate sheet & coil, yaitu lembaran dan gulungan baja yang berkualitas tinggi. Produk ini dapat dibuat dengan berbagai ukuran sesuai kebutuhan konsumen, sehingga sangat fleksibel untuk berbagai aplikasi industri maupun konstruksi. Plate sheet & coil sering dijadikan bahan dasar dalam pembuatan komponen mesin, konstruksi bangunan, hingga manufaktur otomotif, karena ketahanannya yang tinggi terhadap tekanan dan beban.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti membahas dan menggali permasalahan mengenai Prinsip Good Corporate Governance yaitu Responsibility pada divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Pada penelitian ini, peneliti membagi permasalahan menjadi 3 rumusan, yang pertama yaitu bagaimana penerapan prinsip Responsibility diterapkan pada divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Kemudian yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip Responsibility pada divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Dan yang

terakhir yaitu dampak penerapan prinsip Responsibility terhadap kinerja keselamatan dan Kesehatan kerja di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon.

4.2.1. Penerapan Prinsip Responsibility pada Divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa penerapan prinsip responsibility atau tanggung jawab pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon belum terlaksana dengan baik dan konsisten. Meskipun perusahaan telah memiliki kebijakan serta prosedur dasar terkait keselamatan dan kesehatan kerja, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan berbagai kendala baik dari sisi manajemen maupun karyawan.

Secara formal, perusahaan memang sudah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) terkait K3 serta menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh karyawan. Namun, hasil wawancara dengan beberapa pegawai menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur keselamatan belum berjalan secara disiplin. Masih sering dijumpai pekerja yang tidak menggunakan APD lengkap ketika bekerja di area produksi, terutama pada pekerjaan yang dianggap “berisiko rendah”. Hal ini menandakan bahwa kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja masih rendah dan pengawasan dari pihak K3 belum dilakukan secara maksimal.

Selain itu, pelaksanaan safety inspection dan safety meeting belum berjalan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa responden menyebutkan bahwa kegiatan tersebut terkadang hanya dilakukan saat terjadi insiden atau menjelang audit internal. Padahal, sesuai prinsip responsibility dalam Good

Corporate Governance, perusahaan seharusnya melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan untuk mencegah risiko kecelakaan kerja, bukan hanya bertindak secara reaktif ketika masalah sudah terjadi.

Informan 1 menjelaskan bahwa “Sampai saat ini perusahaan belum pernah memberikan pelatihan K3 secara resmi kepada karyawan. Informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja biasanya hanya disampaikan secara lisan oleh supervisor saat briefing pagi”. Dalam hal pelatihan, perusahaan memang telah mengadakan sosialisasi terkait prosedur K3, tetapi frekuensi dan cakupan pelatihan tersebut masih terbatas. Sebagian karyawan baru belum mendapatkan pembekalan yang memadai mengenai budaya keselamatan kerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam memastikan seluruh karyawan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai K3 belum terpenuhi secara optimal.

Dari sisi manajemen, penerapan prinsip tanggung jawab juga masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan dan evaluasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan 3 bahwa “Terkait pelaporan insiden kerja masih sering tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang jelas, bahkan seringkali dianggap oleh manajemen sebagai pelanggaran ringan namun beresiko tinggi”. Tim K3 belum memiliki sistem monitoring yang efektif untuk mengukur kepatuhan karyawan terhadap aturan keselamatan. Selain itu, pelaporan insiden kerja belum terdokumentasi dengan baik dan sering kali tidak dilanjutkan dengan tindakan korektif yang jelas. Beberapa informan menyampaikan bahwa ketika terjadi pelanggaran ringan terhadap aturan K3, sanksi yang diberikan belum tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pekerja lain.

Kurangnya koordinasi antara Divisi K3 dan manajemen operasional juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip responsibility. Dalam beberapa kasus, keputusan terkait keselamatan sering kali ditunda atau diabaikan karena pertimbangan target produksi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi perusahaan masih lebih menitikberatkan pada pencapaian output daripada kepatuhan terhadap prinsip tanggung jawab dan keselamatan kerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip responsibility di Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon masih bersifat administratif dan belum terinternalisasi sepenuhnya dalam budaya kerja perusahaan. Meskipun komitmen terhadap keselamatan telah dinyatakan dalam kebijakan perusahaan, implementasinya belum dijalankan secara konsisten di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal pengawasan, pelatihan, serta penegakan disiplin agar prinsip responsibility benar-benar dapat terwujud dan mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance yang efektif di lingkungan kerja perusahaan.

4.2.2. Tantangan Penerapan Prinsip Responsibility pada Divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Divisi K3 dan beberapa karyawan di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, ditemukan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang menghambat penerapan prinsip responsibility secara optimal. Tantangan-tantangan tersebut muncul dari aspek internal perusahaan maupun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.

1. Rendahnya kesadaran dan kedisiplinan pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja.

Meskipun perusahaan telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan menerapkan prosedur K3, masih banyak pekerja yang mengabaikan penggunaan APD karena merasa tidak nyaman, terburu-buru mengejar target produksi, atau menganggap pekerjaan yang dilakukan tidak berbahaya. Berdasarkan pernyataan informan 1 yang menyatakan bahwa “Hambatan utama yang sering dihadapi dalam menjalankan tanggung jawab K3 adalah kurangnya kesadaran dan kedisiplinan karyawan dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja. Masih ada sebagian pekerja yang menganggap penggunaan alat pelindung diri (APD) tidak terlalu penting”. Sikap tersebut menunjukkan bahwa budaya keselamatan belum tertanam kuat di lingkungan kerja, dan rasa tanggung jawab individu terhadap keselamatan diri sendiri maupun rekan kerja masih perlu ditingkatkan.

2. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan dari manajemen

Berdasarkan keterangan beberapa informan, inspeksi keselamatan tidak selalu dilakukan secara rutin dan terkadang hanya bersifat formalitas menjelang audit. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan 3 yang menjelaskan bahwa “Keterlibatan manajemen dalam pengawasan implementasi K3 bisa dibilang masih lemah. Mereka belum melakukan pengawasan rutin atau inspeksi langsung ke lokasi kerja”. Sanksi terhadap pelanggaran aturan K3 pun belum diterapkan secara tegas, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pekerja yang melanggar. Hal ini memperlihatkan

bahwa tanggung jawab manajemen terhadap penerapan prinsip keselamatan belum sepenuhnya dijalankan dengan konsisten.

3. Terbatasnya jumlah personel dan sarana pendukung di Divisi K3

Jumlah petugas K3 yang ada belum sebanding dengan luas area kerja dan jumlah karyawan yang diawasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan 2 yang menyatakan bahwa “Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan fasilitas pendukung K3, seperti APD yang kadang belum lengkap atau perlu diperbarui”. Akibatnya, pengawasan di lapangan menjadi kurang efektif dan beberapa potensi bahaya tidak segera teridentifikasi. Selain itu, peralatan keselamatan seperti helm, sepatu safety, sarung tangan, dan alat pelindung telinga masih terbatas dalam jumlah maupun kualitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan fasilitas kerja yang aman belum terlaksana dengan optimal.

4. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antarbagian

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa perubahan prosedur atau hasil evaluasi K3 tidak selalu tersampaikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Divisi operasional dan K3 kadang belum berjalan dalam satu jalur koordinasi yang solid, sehingga tindakan pencegahan kecelakaan tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Minimnya komunikasi ini membuat pelaksanaan K3 sering kali bersifat reaktif, bukan preventif. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan 3 yang menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan tanggung jawab K3, hambatan lain yang sering ditemui adalah

kurangnya komunikasi antara manajemen dan pekerja terkait pelaporan kondisi berbahaya di lapangan”.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *responsibility* pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Upaya peningkatan kesadaran, pengawasan, serta penegakan disiplin perlu dilakukan secara sistematis agar seluruh elemen perusahaan, mulai dari manajemen hingga pekerja di lapangan, memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja.

4.2.3. Dampak Penerapan Prinsip Responsibility pada Divisi K3 di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon

Penerapan prinsip *responsibility* dalam *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan menjalankan tanggung jawabnya terhadap karyawan, khususnya dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Pada Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, penerapan prinsip *responsibility* memberikan dampak yang cukup signifikan, baik secara positif maupun dalam bentuk tantangan yang masih perlu diperbaiki.

Dampak positif penerapan prinsip *responsibility* dapat dilihat dari adanya komitmen perusahaan dalam menyediakan kebijakan dan prosedur K3 sebagai pedoman pelaksanaan keselamatan kerja. Perusahaan telah menyusun aturan terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), prosedur kerja aman, serta pembagian

tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan K3. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen telah menyadari pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Selain itu, penerapan prinsip *responsibility* juga berdampak pada meningkatnya kesadaran sebagian karyawan terhadap pentingnya keselamatan kerja. Adanya sosialisasi K3, meskipun belum dilakukan secara rutin, telah mendorong pekerja untuk lebih memahami risiko kerja yang dihadapi serta pentingnya mematuhi aturan keselamatan. Kesadaran ini menjadi salah satu indikator bahwa penerapan prinsip *responsibility* mulai memberikan pengaruh terhadap budaya keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penerapan prinsip *responsibility* pada Divisi K3 belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya pelanggaran terhadap prosedur K3, seperti penggunaan APD yang tidak konsisten dan kurangnya kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja di area produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam pengawasan dan penegakan kebijakan K3 masih perlu ditingkatkan.

Dampak lain yang perlu menjadi perhatian adalah lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan K3. Penerapan prinsip *responsibility* seharusnya tidak hanya berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan yang berkelanjutan serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran K3. Kurangnya pengawasan dan ketegasan dalam penegakan aturan dapat menurunkan efektivitas penerapan K3 dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja.

Selain itu, keterbatasan dalam pelatihan dan edukasi K3 juga berdampak pada belum maksimalnya penerapan prinsip *responsibility*. Pelatihan yang tidak dilakukan secara berkala menyebabkan sebagian karyawan belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur keselamatan kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan perannya dalam memastikan seluruh pekerja memperoleh pengetahuan dan keterampilan K3 yang memadai.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *responsibility* pada Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon telah memberikan dampak awal yang positif dalam bentuk kebijakan dan peningkatan kesadaran keselamatan kerja. Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan dalam pengawasan, penegakan aturan, dan pelatihan K3. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat komitmen manajemen, meningkatkan pengawasan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar penerapan prinsip *responsibility* dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara langsung di lingkungan kerja PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, khususnya pada Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dapat diketahui bahwa penerapan prinsip *responsibility* sebagai bagian dari Good Corporate Governance (GCG) telah mulai dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal. Secara umum, perusahaan telah menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja melalui

penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan, pemasangan rambu-rambu keselamatan di area produksi, serta adanya kegiatan briefing atau toolbox meeting sebelum pekerjaan dimulai. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalkan potensi kecelakaan kerja.

Namun, hasil observasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari karyawan. Beberapa pekerja masih ditemukan tidak menggunakan APD secara lengkap, terutama ketika melakukan pekerjaan ringan atau pada jam kerja yang dianggap tidak berisiko tinggi. Pengawasan dari pihak manajemen juga belum dilakukan secara rutin, sehingga pelanggaran terhadap prosedur K3 sering kali tidak disertai sanksi yang tegas. Selain itu, kegiatan evaluasi terhadap efektivitas penerapan K3 belum dilakukan secara sistematis dan berkala, sehingga perusahaan belum memiliki data yang cukup untuk mengukur keberhasilan kebijakan keselamatan yang diterapkan.

Dalam hal pengelolaan dokumen K3, Divisi K3 telah memiliki sistem pencatatan sederhana terkait laporan insiden, pemeriksaan peralatan, serta data penggunaan APD. Akan tetapi, sistem ini masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam bentuk digital, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan dan analisis data secara cepat.

Selain aspek teknis, dari hasil observasi juga terlihat bahwa kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja masih perlu ditingkatkan. Karyawan cenderung mematuhi aturan K3 hanya ketika diawasi langsung oleh

petugas K3 atau atasan, dan belum menjadikannya kebiasaan yang dilakukan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa budaya keselamatan (safety culture) di perusahaan masih dalam tahap pembentukan dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari nilai-nilai organisasi.

Secara keseluruhan, hasil observasi menggambarkan bahwa PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon telah melakukan langkah awal dalam menerapkan prinsip *responsibility* melalui kebijakan dan kegiatan K3 yang mendukung keselamatan kerja. Namun, penerapan tersebut masih memerlukan peningkatan dalam aspek pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan penerapan sistem izin kerja (PTW) secara menyeluruh. Perusahaan perlu memperkuat komitmen manajemen serta membangun kesadaran pekerja agar prinsip tanggung jawab tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan budaya kerja yang aman, disiplin, serta berkelanjutan.

4.3 Output Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan analisis terhadap penerapan prinsip *responsibility* di Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, diperoleh bahwa perusahaan telah memiliki komitmen awal terhadap penerapan keselamatan kerja, namun belum memiliki sistem pengendalian kerja yang terstruktur untuk memastikan tanggung jawab keselamatan diterapkan di setiap aktivitas pekerjaan. Hal ini terlihat dari belum diterapkannya *Permit To Work* (PTW) secara menyeluruh sebagai dokumen dan prosedur resmi yang mengatur izin kerja berisiko tinggi.

Sebagai hasil dari penelitian ini, output yang dihasilkan berupa usulan implementasi sistem *Permit To Work* (PTW) sebagai instrumen utama penerapan prinsip *responsibility* dalam sistem manajemen K3. PTW merupakan sistem perizinan kerja yang bertujuan untuk memastikan setiap pekerjaan, terutama yang memiliki risiko tinggi seperti pengelasan, pemotongan, pemeliharaan mesin, pekerjaan di ruang terbatas, atau pekerjaan di ketinggian, dilakukan dengan pengendalian yang tepat dan diawasi oleh pihak yang berwenang.

4.3.1 Mekanisme *Permit To Work* (PTW)

Mekanisme *Permit To Work* (PTW) merupakan prosedur resmi yang digunakan untuk memberikan izin pelaksanaan suatu pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, dikendalikan, dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat sebelum pekerjaan dimulai. Penerapan sistem PTW ini menjadi bentuk nyata dari prinsip *responsibility* dalam *Good Corporate Governance*, karena setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap keselamatan kerja.

Berikut adalah mekanisme PTW yang diusulkan untuk diterapkan di Divisi K3 PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon:

1. Permohonan Izin Kerja

Pelaksana atau penanggung jawab pekerjaan (biasanya mandor atau kepala bagian produksi) mengajukan permohonan izin kerja kepada Divisi K3 sebelum pekerjaan dimulai. Permohonan harus mencakup:

- a. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- b. Lokasi dan waktu pelaksanaan.

- c. Potensi bahaya yang mungkin muncul.
- d. Langkah pengendalian risiko yang direncanakan.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Petugas K3 bersama pengawas lapangan melakukan identifikasi potensi bahaya dan menilai tingkat risikonya. Hasil penilaian ini menjadi dasar untuk menentukan apakah pekerjaan dapat dilanjutkan dan tindakan pengendalian apa yang harus diterapkan.

3. Pemeriksaan Area Kerja (Pre-Work Inspection)

Sebelum izin dikeluarkan, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan:

- a. Area kerja aman dan bebas dari bahaya potensial.
- b. Peralatan dalam kondisi baik.
- c. APD tersedia dan sesuai standar.
- d. Sumber energi atau bahan berbahaya telah dikendalikan (misalnya *lock out-tag out*).

4. Penerbitan dan Persetujuan Izin Kerja

Setelah area dinyatakan aman, dokumen PTW diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu:

- a. Pelaksana pekerjaan.
- b. Pengawas lapangan.
- c. Petugas K3.
- d. Supervisor atau kepala bagian terkait.

5. Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengawasan

Selama pekerjaan berlangsung, pengawasan harus dilakukan oleh pengawas lapangan dan petugas K3 untuk memastikan semua langkah keselamatan dijalankan sesuai izin yang telah diberikan.

6. Penutupan dan Evaluasi Izin Kerja

Setelah pekerjaan selesai, pelaksana wajib melaporkan penyelesaian kepada pengawas dan K3 untuk dilakukan pemeriksaan ulang area kerja. Jika area sudah aman, maka izin kerja ditutup dan disimpan sebagai dokumen arsip serta bahan evaluasi berkala.

4.3.2 *Hot Work Permit*

Jenis PTW diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko dan jenis pekerjaan yang dilakukan. *Hot Work Permit* adalah izin kerja yang diberikan untuk kegiatan yang menghasilkan sumber panas, percikan api, atau nyala api yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan. Jenis pekerjaan ini meliputi aktivitas seperti pengelasan (welding), pemotongan logam (cutting), penggerindaan (grinding), penggunaan obor gas (gas torch), serta pekerjaan lain yang melibatkan peralatan listrik berdaya tinggi atau bahan mudah terbakar.

Penerapan *Hot Work Permit* sangat penting karena area kerja industri baja, seperti di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, memiliki bahan mudah terbakar, debu logam, dan peralatan panas yang berpotensi tinggi menimbulkan kebakaran.

Secara prosedural, *Hot Work Permit* harus dikeluarkan sebelum pekerjaan dimulai dan hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dokumen HWP mencakup identifikasi lokasi kerja, jenis pekerjaan panas yang dilakukan, waktu pelaksanaan, daftar potensi bahaya, langkah pengendalian risiko, serta tanda tangan dari pihak

yang bertanggung jawab seperti pelaksana, pengawas, dan petugas K3. Sebelum izin dikeluarkan, dilakukan inspeksi area kerja untuk memastikan bahwa lokasi telah aman dari bahan mudah terbakar, tersedia alat pemadam api ringan (APAR) di sekitar area kerja, dan pekerja telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai seperti sarung tangan tahan panas, kaca pelindung, dan pakaian kerja tahan api.

Selama pekerjaan berlangsung, pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas lapangan atau petugas K3 untuk memastikan pekerja mematuhi seluruh ketentuan yang tertulis dalam izin kerja. Setelah pekerjaan selesai, area kerja harus diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada sisa bara api, percikan, atau material panas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Setelah area dinyatakan aman, izin kerja ditutup dan disimpan sebagai dokumentasi.

Pemilihan *Hot Work Permit* sebagai fokus utama *output* penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting yang relevan dengan kondisi nyata di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon, yaitu:

1. Kesesuaian dengan karakteristik kegiatan perusahaan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi baja dan pengolahan logam, sebagian besar proses kerja di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon melibatkan aktivitas pengelasan, pemotongan, dan perakitan yang menghasilkan panas serta percikan api. Hal ini menjadikan pekerjaan panas sebagai salah satu sumber bahaya utama yang perlu diatur secara ketat melalui sistem izin kerja yang formal.

2. Tingkat risiko yang tinggi terhadap kebakaran dan ledakan

Berdasarkan hasil observasi, area produksi perusahaan memiliki potensi bahaya kebakaran akibat adanya bahan mudah terbakar seperti debu logam, oli, dan sisa bahan pelumas. Dengan adanya sistem Hot Work Permit, setiap aktivitas yang berpotensi memicu api dapat dikendalikan melalui verifikasi area kerja, pemeriksaan alat, dan penetapan tindakan pencegahan sebelum pekerjaan dimulai. 3. Sebagai bentuk nyata penerapan prinsip responsibility

Hot Work Permit secara langsung menggambarkan pelaksanaan prinsip *responsibility* dalam *Good Corporate Governance (GCG)*, karena setiap izin yang diterbitkan melibatkan tanggung jawab berjenjang dari pelaksana, pengawas, hingga manajemen. Setiap tanda tangan dalam dokumen HWP adalah bentuk komitmen bahwa seluruh pihak telah memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman sesuai standar keselamatan.

Dengan demikian, penerapan *Hot Work Permit* diusulkan sebagai prioritas utama dalam pengembangan sistem PTW di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon. Izin kerja ini dinilai paling relevan dengan karakteristik risiko di lapangan dan secara langsung mencerminkan penerapan prinsip *responsibility* dalam tata kelola keselamatan kerja. Melalui penerapan izin kerja panas yang terstruktur dan terawasi dengan baik, perusahaan dapat menekan potensi kecelakaan kerja, memperkuat budaya keselamatan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance*..

Gambar 4. 3 Gambar Hot Work Permit

HOT WORK PERMIT (HWP)

PT. PUTRA STEELINDO PERKASA CILEGON

A. INFORMASI UMUM

No	Keterangan	Isi
1	Nomor Kerja	HWP/...../...../2025
2	Tanggal Pengajuan	
3	Jenis Pekerjaan	☐ Pengelasan ☐ Pemotongan ☐ Grinding ☐ Lainnya:
4	Lokasi Pekerjaan	
5	Penanggung Jawab Pekerjaan	Nama: Jabatan:
6	Pengawas Lapangan	
7	Jumlah Pekerja Terlibat	
8	Waktu Pelaksanaan	Tanggal: Jam: s/d

B. Identifikasi Bahaya dan Tindakan Pengendalian

No	Potensi Bahaya	Langkah Pengendalian yang Diperlukan	Sudah Dilaksanakan
1	Percikan api/panas dari pengelasan	Pasang pelindung percikan dan sekat tahan api	
2	Kebakaran akibat bahan mudah terbakar	Bersihkan area dari bahan mudah terbakar	
3	Ledakan akibat tekanan udara	Gunakan tabung gas sesuai standar dan pastikan regulator aman	
4	Luka bakar pada pekerja	Gunakan APD lengkap	
5	Bahaya listrik	Pastikan kabel dan sambungan Listrik aman dan tidak rusak	
6	Lingkungan kerja panas	Sediakan alat pemadam kebakaran (APAR) dan ventilasi memadai	

C. Perlengkapan Keselamatan

☐ APAR tersedia di lokasi
☐ Area kerja bebas bahan mudah terbakar
☐ Ventilasi memadai

☐ APD lengkap (helm. Sarung tangan, kaca pelindung, pakaian)
☐ Pengawas lapangan hadir selama pekerjaan

D. Persetujuan Izin Kerja

DIAJUKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISETUJUI OLEH
Pelaksana Pekerjaan	Pengawas Lapangan (Supervisor)	Petugas K3 (Safety Officer/HSE Dept.)
Nama:	Nama:	Nama:
Tanda Tangan:	Tanda Tangan:	Tanda Tangan:
Tgl/Jam:	Tgl/Jam:	Tgl/Jam:

E. Hasil Pemeriksaan Pasca Pekerjaan

☐ Area telah diperiksa dan dinyatakan aman
☐ Tidak ada bara api, percikan atau material panas
☐ APAR dan alat kerja dikembalikan ke tempat semula

Diperikas oleh (Petugas K3):
 Tanggal/Jam:

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan prinsip *responsibility* dalam GCG pada Divisi K3 PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal.

Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur K3 sebagai bentuk tanggung jawab manajemen dalam melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam hal kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan penerapan prosedur keselamatan kerja di area produksi.

2. Tantangan utama dalam penerapan prinsip *responsibility*.

Ditemukan lemahnya pengawasan serta belum tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran K3 menyebabkan kebijakan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh karyawan. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi K3 yang belum dilakukan secara rutin turut memengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja.

3. Penerapan prinsip *responsibility* memberikan dampak positif terhadap kesadaran keselamatan kerja, namun belum mampu menciptakan sistem K3 yang efektif dan berkelanjutan.

Adanya kebijakan dan sosialisasi K3 telah meningkatkan kesadaran sebagian karyawan mengenai pentingnya keselamatan kerja. Akan tetapi, dampak tersebut belum maksimal karena belum didukung oleh sistem

pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan yang kuat. Oleh karena itu, penerapan prinsip *responsibility* masih perlu diperkuat agar dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan (PT. Putra Steelindo Perkasa Cilegon)

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan komitmen manajemen dalam menerapkan prinsip *responsibility* secara lebih konsisten, khususnya pada Divisi K3. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan di area kerja, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran K3, serta penyediaan fasilitas keselamatan kerja yang memadai dan merata.

2. Bagi divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Divisi K3 diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pelatihan K3 secara berkala kepada seluruh karyawan agar pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan kerja semakin meningkat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan K3 guna mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada prinsip *responsibility*, tetapi juga mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran. Selain itu, penggunaan metode

kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) dapat dipertimbangkan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Eva Naura Maharani, Afriansyah Mufthi Akbar, Jovita Lituhayu Maheswari, Suwarsit Suwarsit. Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*. 12 November 2024;2(4):384–93.
- Karsono B. Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (Literature Review). Tersedia pada:
<https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Silalahi AFC. Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance (GCG) terhadap peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT.XYZ.
- Hamdani M, Nupikso G. Peningkatan Kinerja Keuangan dan Harga Saham melalui Pengungkapan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Ukuran Perusahaan pada BUMN Go Publik. Vol. VII. 2016.
- Herdiana Dwi Kusuma W, Thalia Zahiraa, Tiffana Deswita Tri M, Denny Oktavina Radianto. Pengaruh Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Terhadap Kinerja Karyawan. *Journal of Educational Innovation and Public Health* [Internet]. 24 April 2024;2(2):60–71. Tersedia pada:
<https://prin.or.id/index.php/Innovation/article/view/2848>
- Siregar NS, Siregar NSI, Artita T, Hasibuan A. Hubungan Antara Budaya K3 dengan Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Konstruksi. *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 11 Mei 2025;3(2):182–9.
- Praditya RA, Zaidan Prayuda R, Purwanto A. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Organisasi. *Professional*

Educaon Studies and Operaons Research [Internet]. 2025;2(2). Tersedia pada:
www.journal-profesor.org

Lintang *, Fauzan S, Prastoto AT, Soesanto E, Fauzan L.S. Implementasi Sistem
Pengelolaan Management Resiko Untuk Perlindungan K3 Karyawan Perusahaan
Berbasis Nilai Nilai Kebangsaan UUD 1945 di PT. Astra Honda Indonesia. Jurnal
Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika [Internet]. 2024;2(4). Tersedia
pada: <https://doi.org/10.61132/merkurius.v2i3.122>

Keselamatan J, Kerja dan Lindungan Lingkungan K, Kadri L, Zainul LM, Studi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja P. Pencapaian penerapan sistem keselamatan
dan Kesehatan Kerja pada PT. Intipratama Mulyasantika. Tersedia pada:
<https://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id/index.php/identifikasi821>

Setiarsih Y, Setyaningsih Y, Widjasena B, Mahasiswa), Keselamatan P, Kerja K, dkk.
Hubungan Karakteristik Pekerja, Promosi K3, dan Ketersediaan Alat Pelindung
Diri (APD) dengan perilaku tidak aman pada pekerja mechanical maintenance.
Vol. 5. 2017. Tersedia pada: <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>

Hermuningsih S, Kusuma H, Cahyarifida RA. Corporate Governance and Firm
Performance: An Empirical Study from Indonesian Manufacturing Firms. Journal
of Asian Finance, Economics and Business. 2020;7(11):827–34.

Christy Gery Buyang, Made Dewi Sariyani, Jim Briand Kolianan. Analysis of
Occupational Safety Policies in the Manufacturing Industry Related to
Compliance and its Impact on Occupational Accidents. Miracle Get Journal. 4
Desember 2024;1(4):52–60.

Umam K, Hidayati N, Saputro YA, Zaroh DF, Rochmanto D. kajian sistem manajemen K3 dan Tingkat kecelakaan kerja pada pekerjaan struktur baja di PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 Jepara. 2020;11.

Satria MF, Dwiatmadja C. Work-life Balance, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Turnover Intention: Studi pada PT Rakyat Makmur Nusantara. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship. 31 Desember 2024;14(1):363–80.

Wardani DM, Sari SP. Analisis Peran Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Transparansi Corporate Social Responsibility. Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia. 1 Februari 2025;6(1).

Nasrullah, Hidayat MA, Raden Mas Hafizh Swardana Suryo Bintoro, Muhammad As'ad. Analisa Pengaruh Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap peningkatan produktivitas kerja. Journal Presumption of Law. 30 Oktober 2023;5(2):124–45.

Satria MF, Dwiatmadja C. Work-life Balance, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Turnover Intention: Studi pada PT Rakyat Makmur Nusantara. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship. 31 Desember 2024;14(1):363–80

Ulfa N, Hayati N, Ayu Wulandari P, Nurul Hidayah A, Muhassinah S, Atiqah Wardah Y, dkk. The 3rd ICO EDUSHA 2022 Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam menghadapi pesaing di PT. Semen Indonesia. [Internet]. Vol. 3.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban		
		A1	A2	A3
1	Apa bentuk tanggung jawab manajemen dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sehari-hari?	Manajemen memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan setiap aktivitas kerja berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Bentuk tanggung jawab tersebut antara lain dengan menyediakan peralatan pelindung diri (APD) yang lengkap dan layak digunakan, melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi peralatan kerja, serta menegakkan aturan keselamatan secara konsisten	Tanggung jawab manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja diwujudkan melalui pengawasan langsung terhadap implementasi kebijakan K3 di lapangan. Manajemen memastikan setiap supervisor dan karyawan menerapkan prosedur keselamatan, serta menindaklanjuti setiap temuan atau potensi bahaya dengan cepat. Namun, hingga saat ini kewajiban untuk menyediakan sarana kesehatan, seperti ruang P3K dan tenaga medis perusahaan, sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan pekerja belum terlaksana.	Manajemen bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan kegiatan operasional perusahaan.

2	Bagaimana perusahaan menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran prosedur keselamatan di lapangan?	Selama ini, kalau ada pelanggaran prosedur keselamatan di lapangan, perusahaan belum punya tindak lanjut yang jelas atau terstruktur. Biasanya hanya diingatkan secara lisan oleh atasan atau pengawas tanpa ada tindakan lanjutan. Belum ada sistem sanksi atau evaluasi khusus untuk menindak pelanggaran tersebut.	Perusahaan belum memiliki prosedur tetap dalam menindaklanjuti pelanggaran keselamatan kerja. Kalau ada karyawan yang melanggar aturan, biasanya cuma ditegur secara langsung tanpa ada laporan resmi.	Untuk saat ini, perusahaan belum melakukan tindak lanjut yang tegas terhadap pelanggaran prosedur keselamatan di lapangan. Biasanya hanya sebatas peringatan lisan dari pengawas, tanpa ada catatan atau evaluasi lebih lanjut.
3	Apakah perusahaan memiliki program khusus untuk meminimalkan dampak operasional terhadap lingkungan sekitar?	Perusahaan saat ini belum memiliki program khusus yang secara spesifik difokuskan untuk meminimalkan dampak operasional terhadap lingkungan sekitar. Namun demikian, perusahaan tetap berupaya menjaga kebersihan area kerja dan lingkungan sekitar dengan menginstruksikan karyawan agar tidak membuang limbah	Tidak ada program lingkungan yang khusus diterapkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Upaya yang dilakukan baru sebatas menjaga kebersihan area kerja dan memastikan limbah produksi tidak menimbulkan gangguan langsung bagi masyarakat sekitar	Perusahaan belum memiliki program formal yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan. Aktivitas operasional masih berjalan berdasarkan prosedur standar yang mengutamakan efisiensi dan keselamatan kerja, tetapi belum secara eksplisit mencakup aspek pengelolaan lingkungan

		sembarangan serta memastikan area produksi tetap tertata dengan baik.		
4	Bagaimana bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab social terkait K3?	Perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial di bidang K3 dengan memastikan seluruh karyawan mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dalam bekerja	Perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan mengacu pada standar K3 yang berlaku.	Komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial terkait K3 tercermin dari keterlibatan manajemen dalam setiap kegiatan keselamatan. Manajemen turut memantau langsung pelaksanaan kebijakan K3 di lapangan, serta menindaklanjuti setiap laporan insiden atau kondisi berbahaya
5	Apa saja pelatihan K3 yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk mendukung penerapan prinsip responsibility?	Sampai saat ini perusahaan belum pernah memberikan pelatihan K3 secara resmi kepada karyawan. Informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja biasanya hanya disampaikan secara lisan oleh supervisor saat briefing pagi.	Hingga saat ini, perusahaan belum pernah melaksanakan pelatihan K3 secara khusus bagi karyawan. Pengetahuan mengenai keselamatan kerja masih disampaikan secara informal melalui arahan dari atasan atau pengawas lapangan	Perusahaan belum memiliki program pelatihan K3 yang terstruktur maupun rutin. Karyawan hanya memperoleh pemahaman dasar mengenai keselamatan kerja melalui pengarahan singkat sebelum memulai pekerjaan.
6	Bagaimana perusahaan memastikan seluruh pekerja memahami hak dan kewajiban	Perusahaan memastikan seluruh pekerja memahami hak dan kewajiban mereka terkait K3 melalui penyampaian langsung dari	Upaya perusahaan dalam memastikan pekerja memahami hak dan kewajiban terkait K3 dilakukan melalui sosialisasi internal yang disampaikan secara lisan.	Perusahaan belum memiliki sistem formal seperti pelatihan atau modul khusus mengenai hak dan kewajiban K3. Namun, pemahaman tersebut diberikan secara sederhana

	mereka terkait K3?	atasan atau pengawas lapangan. Setiap awal pekerjaan, pekerja diberikan pengarahan singkat mengenai pentingnya menjaga keselamatan, menggunakan alat pelindung diri, dan mengikuti prosedur kerja aman. Meskipun belum dilakukan secara formal dalam bentuk pelatihan, pengarahan rutin ini menjadi sarana utama untuk menanamkan pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban dalam K3.	Pengawas lapangan biasanya memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab pekerja terhadap keselamatan kerja serta hak mereka untuk bekerja dalam kondisi aman.	melalui briefing sebelum memulai pekerjaan. Dalam kegiatan tersebut, pengawas memberikan instruksi mengenai penggunaan APD, kewajiban mematuhi aturan keselamatan, serta hak pekerja untuk melaporkan potensi bahaya di tempat kerja.
7	Sejauh mana manajemen terlibat langsung dalam pengawasan implementasi K3 di lapangan?	Peran manajemen dalam mengawasi pelaksanaan K3 masih terbatas. Mereka belum terlibat secara langsung dan rutin untuk memastikan aturan keselamatan benar-benar dijalankan. Biasanya manajemen baru turun tangan	Selama ini, pengawasan dari manajemen terhadap pelaksanaan K3 belum terlalu aktif. Manajemen lebih banyak memberikan arahan secara umum, tapi jarang melakukan pengecekan langsung ke lapangan.	Keterlibatan manajemen dalam pengawasan implementasi K3 bisa dibilang masih lemah. Mereka belum melakukan pengawasan rutin atau inspeksi langsung ke lokasi kerja.

		kalau ada masalah atau insiden di lapangan, bukan sebagai bagian dari pengawasan harian.		
8	Apa saja hambatan yang sering dihadapi dalam menjalankan tanggung jawab K3, dan bagaimana solusinya?	Hambatan utama yang sering dihadapi dalam menjalankan tanggung jawab K3 adalah kurangnya kesadaran dan kedisiplinan karyawan dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja. Masih ada sebagian pekerja yang menganggap penggunaan alat pelindung diri (APD) tidak terlalu penting. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan pembinaan langsung di lapangan dan memberikan teguran bagi karyawan yang melanggar, serta terus mengingatkan pentingnya keselamatan kerja dalam setiap briefing.	Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan fasilitas pendukung K3, seperti APD yang kadang belum lengkap atau perlu diperbarui. Kondisi ini dapat menghambat penerapan K3 secara optimal. Sebagai solusi, manajemen berupaya menambah anggaran untuk pengadaan APD agar tetap layak pakai.	Dalam pelaksanaan tanggung jawab K3, hambatan lain yang sering ditemui adalah kurangnya komunikasi antara manajemen dan pekerja terkait pelaporan kondisi berbahaya di lapangan. Solusinya, perusahaan mulai mendorong budaya komunikasi terbuka dan memberikan pemahaman bahwa pelaporan potensi bahaya merupakan bagian dari tanggung jawab Bersama.
9	Bagaimana perusahaan melakukan	Selama ini perusahaan belum pernah	Perusahaan belum punya mekanisme atau prosedur yang	perusahaan belum memiliki sistem evaluasi untuk

	evaluasi efektifitas kebijakan K3 yang sudah diterapkan?	melakukan evaluasi khusus terkait efektifitas kebijakan K3. Semua kegiatan berjalan seperti biasa tanpa ada peninjauan ulang atau penilaian sejauh mana aturan K3 sudah diterapkan dengan baik. Jadi bisa dibilang, belum ada proses evaluasi yang terstruktur dari manajemen.	jenis untuk mengevaluasi kebijakan K3. Sampai sekarang, belum pernah dilakukan penilaian formal mengenai apakah kebijakan yang diterapkan sudah efektif atau belum.	mengukur seberapa efektif kebijakan K3 yang sudah ada. Semua berjalan berdasarkan kebiasaan dan pengalaman kerja sehari-hari, bukan dari hasil penilaian resmi.
10	Apakah ada bentuk penghargaan atau sanksi bagi karyawan terkait kepatuhan pada aturan K3?	Perusahaan belum memiliki sistem penghargaan yang formal bagi karyawan yang patuh terhadap aturan K3, namun bentuk apresiasi tetap diberikan secara lisan oleh atasan atau pengawas lapangan	perusahaan tidak menerapkan penghargaan khusus bagi karyawan yang taat terhadap K3. Namun, karyawan yang menunjukkan kepedulian dan kedisiplinan tinggi terhadap keselamatan biasanya mendapatkan penilaian positif dari atasan.	untuk penghargaan, perusahaan belum memiliki kebijakan khusus, tetapi sering memberikan pujian atau ucapan terima kasih secara informal bagi pekerja yang aktif menjaga keselamatan. Hal ini menjadi cara sederhana untuk memotivasi kepatuhan terhadap aturan K3. Terkait pelaporan insiden kerja masih sering tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang jelas, bahkan seringkali dianggap oleh manajemen sebagai pelanggaran ringan namun beresiko tinggi.
11	Apa langkah perusahaan untuk meningkatkan	Hingga saat ini, perusahaan belum menerapkan	Perusahaan belum memiliki kebijakan formal yang secara langsung	Penerapan prinsip responsibility di perusahaan belum berjalan secara nyata.

	kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari prinsip responsibility?	prinsip responsibility secara khusus dalam kebijakan kesejahteraan karyawan. Upaya peningkatan kesejahteraan masih dilakukan secara umum, seperti pemberian gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	mencerminkan prinsip responsibility dalam peningkatan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan pekerja masih sebatas pada pemenuhan kewajiban dasar, seperti pembayaran upah tepat waktu dan jaminan sosial	Tidak terdapat program khusus yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
12	Bagaimana keterlibatan stakeholder (seperti Masyarakat sekitar atau pemerintah) dalam mendukung penerapan K3 di perusahaan?	Keterlibatan stakeholder dalam mendukung penerapan K3 di perusahaan masih bersifat terbatas. Pemerintah umumnya berperan dalam melakukan pengawasan melalui inspeksi atau kunjungan tertentu untuk memastikan perusahaan menjalankan aturan keselamatan kerja. Sementara itu, masyarakat sekitar belum terlibat secara langsung, namun perusahaan tetap menjaga hubungan baik melalui komunikasi dan kepedulian terhadap	Peran stakeholder dalam penerapan K3 terutama datang dari instansi pemerintah, seperti Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Lingkungan Hidup, yang sesekali melakukan pembinaan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi K3.	Dalam penerapan K3, perusahaan mendapatkan dukungan terutama dari pihak pemerintah melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja.

		lingkungan sekitar.		
13	Menurut Anda, sejauh mana penerapan prinsip responsibility berdampak terhadap budaya keselamatan kerja di perusahaan?	penerapan prinsip responsibility belum terlihat secara jelas di perusahaan, sehingga dampaknya terhadap budaya keselamatan kerja juga belum terasa signifikan. Karyawan menjalankan kegiatan keselamatan kerja lebih karena arahan langsung dari atasan, bukan dari kesadaran tanggung jawab pribadi.	prinsip responsibility belum diterapkan secara formal di lingkungan perusahaan. Kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan kerja masih berjalan sebatas pemenuhan prosedur, bukan sebagai hasil dari penerapan nilai tanggung jawab.	Penerapan prinsip responsibility di perusahaan belum berjalan dengan optimal, bahkan bisa dikatakan belum diterapkan secara sistematis. Kesadaran mengenai pentingnya tanggung jawab dalam menjaga keselamatan kerja masih rendah, baik di tingkat manajemen maupun karyawan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI**

Jalan Gubernur Mochtar
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7471379
Laman: www.vokasi.undip.ac.id
Pos-el: vokasi@undip.ac.id

No : 289/UN7.M2.1/KM/IX/2025
Lampiran : -
Hal : Surat Permohonan Izin Penelitian

Semarang, 24 September 2025

Yth. Direktur PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon
PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon
Jl. Raya Bojonegara Rt 001/rw 004
Link. Karang Tengah, Kedaleman, Cibeber
Banten

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan penelitian untuk memperoleh data, baik dari Instansi Pemerintah maupun Swasta.

Mohon sekiranya dapat diberikan izin bagi mahasiswa S.Tr. Manajemen dan Administrasi Logistik Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro untuk dapat melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data di PT Putra Steelindo Perkasa Cilegon.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Raka Ramdani
NIM : 40011321650011
Alamat Rumah :
Jurusan : S.Tr. Manajemen dan Administrasi Logistik
Judul TA : Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada
Divisi K3 Pt Putra Steelindo Perkasa Cilegon

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M.
NIP. 196708191994032003

Tembusan : Yth.

1. Dekan Sekolah Vokasi
2. Kaprodi S.Tr. Manajemen dan Administrasi Logistik

Lampiran 3 Biodata Peneliti

1. Nama Lengkap : Raka Ramdani
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jurusan : D-IV Manajemen dan Administrasi Logistik
4. NIM : 40011321650011
5. Instansi : Universitas Diponegoro
6. Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 23 Agustus 2003
7. Alamat E-mail : rakaramdani2551@gmail.com



Lampiran 4 Surat Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI
MANAJEMEN ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Jalan Erlangga Tengah No. 17, Pleburan,
Semarang, Kode Pos 50241
Telepon/Faksimile (024) 7648653
Laman: <https://sp.vokasi.undip.ac.id/>
email: ap@live.undip.ac.id

KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

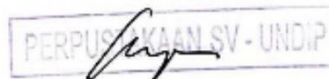
Tim Pemeriksa Kemiripan Tulisan Ilmiah Telah Memeriksa Unggahan File Atas Nama:

Nama : **Raka Ramdani**
NIM : **40011321650011**
Program Studi : **Manajemen dan Administrasi Logistik**
Judul Tulisan : **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD
CORPORATE GOVERNANCE PADA DIVISI K3 PT.
PUTRA STEELINDO PERKASA CILEGON**
Jenis Dokumen : **Tugas Akhir**
Paper ID : **2709220722**
Tanggal Pemeriksaan : **28 November 2025**

Menyatakan Bahwa Hasil Pemeriksaan Dengan Menggunakan Aplikasi Turnitin Terhadap Tulisan Ilmiah Dengan Judul Diatas Menghasilkan Kemiripan Sebesar 20% Dengan Sumber-Sumber Online Lainnya.

Demikian Surat Keterangan Ini Dibuat Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Tim Verifikasi
Unit Perpustakaan Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro



Alina Indrawati
NIP : 197407101999032002

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian





